



LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2023

RENCANA KERJA
TAHUN 2023

DINAS TENAGA KERJA DAN
PERINDUSTRIAN
KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2022



WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : 1. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah;
2. bahwa berdasarkan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya

Solok dan Payakumbuh;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
14. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);

15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 195);
16. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 3)
17. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 45);
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
20. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 03);

21. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Payakumbuh.
3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
6. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025, selanjutnya disebut RPJPD Kota Payakumbuh adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, selanjutnya disingkat RPD Tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 4 (empat) tahun.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Struktur Tata Ruang Kota yang mengatur struktur dan pola tata ruang wilayah kota.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 4 (empat) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah, adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.
16. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan

dari suatu kegiatan.

17. Strategi adalah langkah - langkah berisikan program - program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
18. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
19. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
20. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang berisi satu atau lebih sub-kegiatan untuk menghasilkan keluaran (*output*) atau semi output dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
21. Sub-kegiatan adalah serangkaian aktivitas pekerjaan atau layanan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menghasilkan keluaran (*output*).
22. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
23. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
24. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
25. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
26. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun

keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

BAB II

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023 merupakan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2023.

Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023 ditetapkan oleh Walikota Payakumbuh.
- (2) Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta sesuai dengan urusan dan kewenangan Perangkat Daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang menyusun Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
 5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 7. Dinas Sosial;
 8. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
 9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 10. Dinas Ketahanan Pangan;
 11. Dinas Lingkungan Hidup
 12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
19. Dinas Pertanian;
20. Sekretariat Daerah;
21. Sekretariat DPRD;
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
23. Badan Keuangan Daerah
24. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
25. Inspektorat;
26. Kecamatan Payakumbuh Utara;
27. Kecamatan Payakumbuh Barat;
28. Kecamatan Payakumbuh Timur;
29. Kecamatan Payakumbuh Selatan;
30. Kecamatan Lamposi Tigo Nagori; dan
31. Kantor Kesbangpol.

Pasal 4

Renja Perangkat Daerah harus memuat program, kegiatan, sub-kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan bersifat indikatif

Pasal 5

Sistematika dokumen Renja Perangkat Daerah tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya terdiri dari :

- a. pendahuluan;
- b. hasil evaluasi renja perangkat daerah tahun lalu;
- c. tujuan dan sasaran perangkat daerah;

- d. rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah;
dan
- e. penutup.

Pasal 6

Dokumen Renja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran peraturan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023 harus mempedomani dan mengacu pada :

- a. RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026;
- b. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;
- c. RTRW Kota Payakumbuh; dan
- d. Hasil pelaksanaan musrenbang forum Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 8

Penetapan Renja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023 bertujuan untuk :

- a. mewujudkan perencanaan teknis Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun ke depan;
- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan
- c. sebagai penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan

evaluasi perencanaan kerja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Apabila dalam pelaksanaan RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2023 mengalami perubahan, maka Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 juga harus mengikuti perubahan tersebut dan akan ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 8 Agustus 2022

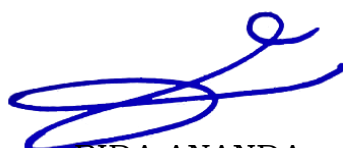
WALIKOTA PAYAKUMBUH,



RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 8 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,



RIDA ANANDA

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2022 NOMOR 13

KATA PENGANTAR

Tujuan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Payakumbuh dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah periode 2023-2026 antara lain :

- a. Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas;
- b. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas;
- c. Terwujudnya pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel;
- d. Terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan;
- e. Meningkatnya tata kehidupan masyarakat yang berkarakter dan berbudaya.

Tujuan 2 dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah periode 2023-2026 Kota Payakumbuh menjadi bagian dari tugas pokok Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian untuk mewujudkannya.

Langkah awal dari upaya Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut dilaksanakan melalui berbagai urusan bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian sudah dapat dirumuskan dalam bentuk Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026 dan dijabarkan pada Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahunnya. Renja Tahun 2023 ini memuat program, kegiatan dan sub kegiatan strategis pembangunan ekonomi masyarakat melalui ketenagakerjaan dan perberdayaan IKM.

Alhamdulillah, dengan memanjatkan rasa syukur ke hadirat Allah SWT, proses dan tahapan penyusunan dokumen Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh ini sudah dapat di rampungkan. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Petunjuk Pelaksanaannya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa penyusunan dokumen Rencana Kerja ini merupakan bagian dari Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Semoga dokumen Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dapat memberi manfaat bagi segenap Stakeholders terkait dengan pelaksanaan fungsi pelayanan dan tugas pokok kedinasan.

Dan ucapan terimakasih terhadap semua pihak serta tim perumus dan penyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 ini, dengan harapan dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan dalam mewujudkan capaian Tujuan, Sasaran dan Program Pelaksanaan Pembangunan untuk masa lima tahun kedepan. Terima Kasih.

Payakumbuh, 8 Agustus 2022

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Kota Payakumbuh



YUNIDA FATWA, S.Sos. M.Si
NIP. 19670601 198809 2 001

DAFTAR ISI

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	32
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	44
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	51
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	68
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	78
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	78
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	79
3.3 Program dan Kegiatan	80
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	93
BAB V PENUTUP	108
LAMPIRAN	109

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Evaluasi Hasil Pelaksana Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Desember 2021 Kota Payakumbuh	19
Tabel II.2	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	42
Tabel II.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kota Payakumbuh	52
Tabel II.4a	Persandingan Daftar Kegiatan Prioritas Hasil Musrenbang Kecamatan Payakumbuh Tahun 2022 dengan Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Per Kecamatan	69
Tabel II.4aa	Persandingan Daftar Kegiatan dan E-Pokir dengan Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	75
Tabel II.4b	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023	76
Tabel III.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiran Maju Tahun 2023 Kota Payakumbuh	81
Tabel IV.1	Pemerintah Kota Payakumbuh Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dengan Prioritas Daerah Tahun Anggaran 2023	94
Tabel IV. 2	Usulan Program/Kegiatan yang Mendukung Prioritas Nasional Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2023	104

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh ini merupakan suatu tahapan operasionalisasi dari Renstra periode Tahun 2023-2026. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh disusun sebagai pedoman perencanaan program dan kegiatan pembangunan yang secara eksplisit menetapkan kebijakan-kebijakan prioritas sebagai acuan dalam melaksanakan tugas pokok fungsi Dinas, sehingga target kinerja yang telah direncanakan di dalam Perubahan Renstra dapat tercapai dengan baik. Rencana Kerja juga diharapkan sebagai koreksi apabila terjadi perkembangan baru di lingkungan strategis yang perlu untuk ditindak lanjuti sampai sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Strategis.

Rencana Kerja ini merupakan suatu aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di masa yang akan datang untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang, sehingga pokok dari perencanaan kinerja adalah penetapan tingkat capaian kinerja yang dinyatakan melalui ukuran kinerja atau indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran atau target yang telah ditetapkan.

Secara umum perencanaan kinerja ini merupakan alat manajemen sebagai upaya peningkatan kinerja untuk mengutamakan daya analisis yang tajam dalam menentukan target dan analisis. Oleh karena itu dalam Rencana Kerja ini akan mencantumkan program dan kegiatan yang terperinci untuk jangka pendek sebagai penerjemahan dari sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu dalam perencanaan

kinerja, tidak hanya menyangkut langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian target, akan tetapi meliputi pengaturan berbagai sumber baik yang telah dimiliki maupun yang diperlukan secara optimal.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah melalui beberapa proses persiapan dan tahapan, diantaranya sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah;
2. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;
3. Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah;
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah;
6. Penetapan Renja Perangkat Daerah.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasikan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh pada Tahun 2022 ini menyusun Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2023. Proses penyusunan Renja sesuai dengan bahan Musrenbang RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2022 yang akan mengacu pada Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2023-2026, sehingga akan memudahkan di dalam mengukur target kinerja tahunan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

14. Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2023;
18. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17);
21. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 3);
22. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penetapan Renstra Perangkat Daerah;
23. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 Nomor 4);

25. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 Nomor 41);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2023 adalah untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh untuk 1 (satu) tahun mendatang. Secara rinci maksud dari penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh sebagai berikut :

1. Memberikan arah bagi seluruh jajaran manajemen Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat;
2. Sebagai dokumen perencanaan 1 (satu) tahun guna membangun kinerja yang lebih akuntabel pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2023 adalah untuk perencanaan pengembangan, penumbuhan dan peningkatan dibidang Tenaga Kerja dan Perindustrian melalui arah kebijakan, strategi serta sasaran-sasaran program yang ingin dicapai selama 1 (satu) tahun, serta mengukur kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dalam mendukung Pembangunan Daerah.

Dalam Rencana Kerja Tahun 2023 ini juga terdapat informasi-informasi yang memudahkan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dalam melakukan pengukuran dan penilaian kinerja serta memudahkan dalam proses monitoring dan evaluasi kinerja, sehingga pada akhirnya kami dapat melakukan koreksi dini atas berbagai penyimpangan dari target-target yang telah ditentukan.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2021 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dimaksud untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dalam menjalankan program dan kegiatan yang direncanakan, faktor-faktor apa yang mendukung terpenuhinya target kinerja program/kegiatan dan hambatan/kendala yang menyebabkan target tidak tercapai.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2021, capaian Rencana Kerja Tahun 2021 dan capaian target Perubahan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, pada Urusan Wajib Ketenagakerjaan dan Urusan Pilihan Perindustrian. Realisasi program/kegiatan Tahun 2021 yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program ini dilaksanakan dengan target Nilai IKM sebesar 89 dan terealisasi sebesar 89 dengan capaian 100% yang dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan ini berupa Penyusunan dokumen SOP, RENJA, IKM dan IPM OPD pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dengan target sebanyak 4 dokumen dan terealisasi sebanyak 4 dokumen dengan capaian 100 %. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.169.350,- dan terealisasi sebesar Rp. 49.297.270,- atau 98,26%.

- 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Sub kegiatan ini berupa penyusunan dokumen laporan (LAKIP, LKPJ, EKPPD dan Laporan bulanan) dan Koordinasi yang dilaksanakan pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dengan target sebanyak 4 dokumen dan 7 kali dan terealisasi sebanyak 4 dokumen dan 7 kali dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 57.911.840,- dan terealisasi sebesar Rp. 56.099.860,- atau 96,87%.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sub kegiatan ini berupa pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN, penyediaan pembayaran honor pengelola administrasi keuangan pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara, PPTK dan staf pengelola, Pengurus Barang, Pejabat Pengadaan serta pembayaran uang lembur dan uang makan lembur pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dengan target sebanyak 43 orang dan terealisasi sebanyak 43 orang dengan capaian 100% . Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.368.734.186,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.194.167.318,- atau 92,63%.
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sub kegiatan ini berupa penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dengan target sebanyak 6 jenis dan terealisasi sebanyak 6 jenis dengan capaian 100% . Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.004.910,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.004.890,- atau 100%.
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sub kegiatan ini berupa pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor yaitu pembelian computer, printer, hardisk, filling cabinet pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh

dengan target sebanyak 5 unit dan terealisasi sebanyak 2 unit dengan capaian 40% . Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 29.324.950,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.706.680,- atau 12,64%.

Permasalahan :

Adanya beberapa item yang tidak bisa di belanjakan, karena jenis barang yang ada dalam SIPD tidak tersedia sesuai spesifikasi teknis di pasaran

Solusi :

Ke depan, untuk pengadaan akan dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Dinas Kominfo yang lebih memahami spesifikasi teknis barang yang beredar di pasaran serta mengkoordinasikan dengan BKD yang mengkoordinir sistem SIPD tingkat Kota Payakumbuh

3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sub kegiatan ini berupa penyediaan alat tulis kantor pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dengan target sebanyak 83 jenis dan terealisasi sebanyak 83 jenis dengan capaian 100% . Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 54.536.050,- dan terealisasi sebesar Rp. 54.480.800,- atau 99,90%.

4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Sub kegiatan ini berupa penyediaan bahan cetak, biaya penggandaan dan penjilidan pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dengan target sebanyak 10 jenis dan terealisasi sebanyak 10 jenis dengan capaian 100% . Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 22.863.770,- dan terealisasi sebesar Rp. 22.800.350,- atau 99,72%.

5) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Sub kegiatan ini berupa penyediaan surat kabar yaitu Padang Ekspres dan Haluan pada sebanyak 1016 koran dan terealisasi sebanyak 1016 koran dengan capaian 100% . Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.004.560,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.004.180,- atau 99,99%.

- 6) Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
Sub kegiatan ini berupa penyediaan makanan dan minuman tamu pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dengan target sebanyak 600 porsi dan terealisasi sebanyak 600 porsi dengan capaian 100% . Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.498.950,- atau 99,99%.
- 7) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sub kegiatan ini berupa penyediaan biaya perjalanan dinas dalam maupun luar daerah Provinsi Sumatera Barat pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dengan target sebanyak 20 kali dan terealisasi 20 kali dengan capaian 100% . Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 108.450.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 107.920.857,- atau 99,51%.
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Sub kegiatan ini berupa penyediaan benda pos berupa materai dan buku cek dengan target sebanyak 10 buku dan 63 lembar dan terealisasi sebanyak 9 buku dan 63 lembar dengan capaian 98,63% . Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.205.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.750.000,- atau 79,37%.
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sub kegiatan ini berupa penyediaan jasa komunikasi/internet pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dengan target sebanyak 12 rekening dan terealisasi sebanyak 12 rekening dengan capaian 100% . Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 23.880.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 18.894.610,- atau 79,12%.
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sub kegiatan ini Kantor berupa penyediaan Honor THL kebersihan, THL keamanan dan THL Pramubakti dan penyediaan makan minum sebanyak 630 porsi pada Dinas Tenaga Kerja dan

Perindustrian Kota Payakumbuh dengan target sebanyak 4 orang THL dan 630 porsi dan terealisasi sebanyak 4 orang dan 630 porsi dengan capaian 100% . Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 122.253.804,- dan terealisasi sebesar Rp. 120.587.752,- atau 98,64%.

5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sub kegiatan ini berupa pembayaran pajak kendaraan dinas, penggantian suku cabang, service, oli/pelumas dan BBM pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dengan target sebanyak 1 unit dan terealisasi sebanyak 1 unit dengan capaian 100% . Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 39.190.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 38.998.710,- atau 99,51%.

2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sub kegiatan ini berupa pembayaran pajak kendaraan dinas, penggantian suku cabang, service, oli/pelumas dan BBM pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dengan target sebanyak 12 unit (1 unit roda 4 dan 11 unit roda 2) dan terealisasi sebanyak 12 unit dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 59.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 57.196.944,- atau 96,29%.

3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel

Sub kegiatan ini berupa pemeliharaan meja kerja dan lemari pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dengan target sebanyak 48 unit dan terealisasi sebanyak 48 unit dengan capaian 100% . Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.638.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.630.600,- atau 99,86%.

4) Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sub kegiatan ini berupa pemeliharaan servis AC, computer dan printer pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dengan target sebanyak 17 unit dan terealisasi sebanyak 17 unit dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.210.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 11.153.250,- atau 99,49%.

II. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

Program ini dilaksanakan dengan target dan realisasi sebagai berikut :

1. Jumlah tenaga kerja yang berwirausaha sebanyak 25 orang dan terealisasi sebanyak 20 orang dengan capaian 80%
2. Jumlah tenaga kerja yang diserap wirausaha sebanyak 45 orang dan terealisasi sebanyak 35 orang dengan capaian 77,78%

Yang dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi
 - 1) Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
Sub kegiatan ini berupa pelatihan menjahit pengembangan busana dengan target sebanyak 25 orang dan terealisasi sebanyak 25 orang dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 73.148.945,- dan terealisasi sebesar Rp. 69.729.350,- atau 95,33%.

III. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

Program ini dilaksanakan dengan target jumlah tenaga kerja yang ditempatkan sebanyak 239 orang dan terealisasi sebanyak 215 orang dengan capaian 89,96% yang dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
Kegiatan ini dilaksanakan dengan target jumlah pencari kerja yang terdaftar di Bursa Kerja Online sebanyak 200 orang dan terealisasi 465 orang dengan capaian 232,5% dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online

Sub kegiatan ini berupa pembayaran honor THL IPK dan pemeliharaan computer dan printer dengan target sebanyak 3 orang THL, 1 unit computer, 1 unit printer dan terealisasi sebanyak 3 orang THL, 1 unit computer, 1 unit printer dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 87.507.517,- dan terealisasi sebesar Rp. 84.932.491,- atau 97,06%.

2) Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online

Sub kegiatan ini berupa pelaksanaan Sosialisasi Bursa Kerja terhadap siswa tamatan SMK Se-Kota Payakumbuh dengan target sebanyak 180 orang dan terealisasi sebanyak 180 orang dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 27.072.340,- dan terealisasi sebesar Rp. 25.302.900,- atau 93,46%.

IV. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

Program ini dilaksanakan dengan target jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan sebanyak 4 kasus dan terealisasi sebanyak 3 kasus (sesuai dengan jumlah kasus yang masuk) dengan capaian 100%, yang dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

1) Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan ini berupa pelaksanaan sosialisasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial perusahaan dengan target sebanyak 50 perusahaan dan terealisasi sebanyak 42 perusahaan dengan capaian 84%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.538.520,- dan terealisasi sebesar Rp. 15.923.000,- atau 90,79%.

2) Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota

Sub kegiatan ini berupa kasus (perselisihan antara pekerja dan pemberi kerja) yang masuk ke Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Bidang Tenaga Kerja) yang difasilitasi untuk penyelesaiannya dengan target sebanyak 3 kasus dan terealisasi sebanyak 3 kasus dengan capaian 100% . Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.079.260,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.927.500,- atau 96,28%.

V. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

Program ini dilaksanakan dengan target dan realisasi sebagai berikut :

1. Persentase industri yang menerapkan Teknologi Tepat Guna sebesar 3,30% dan terealisasi sebesar 2,1 % dengan capaian 63,64%
2. Persentase sentra/klaster industri yang tertata sebesar 40,00% dan terealisasi sebesar 40% dengan capaian 100%

Yang dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
Sub Kegiatan ini berupa biaya operasional Dekranasda dalam mengikuti agenda rutin Dekranasda Propinsi dan Pusat, mengikuti event, study komparatif fashion, dan temu bisnis usaha kerajinan dengan target sebanyak 3 kegiatan terealisasi sebanyak 3 kegiatan dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 315.185.940,-dan terealisasi sebesar Rp. 288.267.156,- atau 91,46%.
 - 2) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
Sub kegiatan ini berupa pelaksanaan pelatihan/workshop penguatan peralatan produksi bagi IKM melalui Teknologi Tepat Guna, dimana kegiatan ini merupakan pembinaan dan fasilitasi untuk IKM seksi industry logam, elektronika, kimia dan bahan bangunan khususnya IKM bengkel las Kota Payakumbuh yang telah memiliki sertifikasi profesi dari BNSP (Badan Nasional Sertifikasi

Profesi) dalam mengembangkan kreatifitas, menciptakan inovasi pembuatan produk-produk TTG yang dapat bernilai guna bagi usaha lain, untuk Tahun 2021 TTG yang dicoba dibuat adalah mesin chopper atau mesin pencacah yang dapat digunakan oleh usaha peternakan dalam pengolahan makanan ternak dengan target sebanyak 10 IKM dan terealisasi sebanyak 10 IKM dengan capaian 100% . Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 34.116.005,- dan terealisasi sebesar Rp. 27.628.050,- atau 80,98%.

3) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Sub Kegiatan ini berupa pengadaan kemasan tersier rendang (paper bag) dengan target 1.500 pcs dan terealisasi sebanyak 1.500 pcs, dan biaya operasional sentra rendang (UPTD) selama 1 tahun. Pada sub kegiatan ini terealisasi 100% yang dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 606.851.352,- dan terealisasi sebesar Rp. 544.546.755,- atau 89,73%.

4) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

Sub Kegiatan ini berupa pelaksanaan Workshop sandang dan kerajinan yang dilaksanakan dengan 2 Workshop : Workshop rancang busana aplikasi border dan Workshop diverifikasi produk rendo bangku dan pembayaran THL di MPP dan THL Tenun Balai Panjang dengan target sebanyak 30 IKM dan 4 orang THL dan terealisasi sebanyak 30 IKM dan 4 orang THL dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 187.322.706,- dan terealisasi sebesar Rp. 181.592.393,- atau 96,94%.

5) Sub Kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri

Sub Kegiatan ini berupa pengadaan peralatan pendukung produksi dengan target sebanyak 10 paket pekerjaan (9 paket kontruksi sentra IKM rendang dan 1 pengadaan mobile Galeri) dan terealisasi sebanyak 7 paket (6 paket kontruksi sentra IKM rendang dan 1 pengadaan mobile Galeri) dengan capaian 70%. Dilaksanakan

dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.019.948.650,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.561.666.677,- atau 31,11%.

Secara prosedur pelaksanaan kegiatan ini sudah dilakukan proses pengadaan, adapun permasalahan yang dihadapi dalam pengadaan mesin operasional dan pengadaan alat promosi yang tidak bias dipenuhi pada Tahun anggaran 2021 pada sentra IKM rendang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Item barang yang tidak dapat terpenuhi oleh pihak ketiga;
2. Spek teknis pemenang tender tidak sesuai dengan yang ditawarkan;
3. Dokumen asli pemenang belum lengkap;
4. Barang yang tersedia dipasaran mengalami lonjakan harga.

Solusi :

1. paket pekerjaan/item pekerjaan lebih disederhanakan;
2. proses lelang/tender lebih awal;
3. perencanaan pekerjaan yang lebih matang.

VI. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA

1. Persentase industri yang menerapkan standarisasi mutu produk sebesar 2,50% dan terealisasi sebesar 2,2% dengan capaian 88%
2. Jumlah produk industri yang mendapat sertifikat produk sebesar 1 buah dan terealisasi sebesar 9 buah dengan capaian 900%

Yang dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penertiban Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Sub kegiatan ini berupa fasilitasi Sertifikat Halal untuk IKM Industri Pangan dengan target sebanyak 10 IKM dan terealisasi sebanyak 9 IKM dengan capaian 90%. Dilaksanakan dengan alokasi

anggaran sebesar Rp. 37.230.030,- dan terealisasi sebesar Rp. 36.835.090,- atau 98,94%.

Dari uraian diatas terlihat bahwa capaian Kinerja semua urusan terlaksana dengan cukup baik, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2021 menunjukkan bahwa sasaran yang diinginkan pada Tahun 2021 telah cukup memenuhi target. Sedangkan anggaran yang tersedia untuk mendukung secara langsung dalam pencapaian Kegiatan/Program/Sasaran Strategis Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 9.384.278.285,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.601.544.343,- atau 59,69%.

Dalam penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja dan Perindustrian selama Tahun 2021 terdapat beberapa kegiatan yang realisasinya belum sesuai target. Adapun sub kegiatan dimaksud beserta permasalahan dan solusinya yaitu :

1. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub kegiatan ini berupa pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor yaitu pembelian computer, printer, hardisk, filling cabinet pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dengan target sebanyak 5 unit dan terealisasi sebanyak 2 unit dengan capaian 40% . Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 29.324.950,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.706.680,- atau 12,64%.

Permasalahan :

Adanya beberapa item yang tidak bisa di belanjakan, karena jenis barang yang ada dalam SIPD tidak tersedia sesuai spesifikasi teknis di pasaran

Solusi :

Ke depan, untuk pengadaan akan dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Dinas Kominfo yang lebih memahami spesifikasi teknis barang yang beredar di pasaran serta mengkoordinasikan dengan BKD yang mengkoordinir sistem SIPD tingkat Kota Payakumbuh

2. Sub Kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri

Sub Kegiatan ini berupa pengadaan peralatan pendukung produksi dengan target sebanyak 10 paket pekerjaan (9 paket kontruksi sentra IKM rendang dan 1 pengadaan mobile Galeri) dan terealisasi sebanyak 7 paket (6 paket kontruksi sentra IKM rendang dan 1 pengadaan mobile Galeri) dengan capaian

70%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.019.948.650,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.561.666.677,- atau 31,11%.

Secara prosedur pelaksanaan kegiatan ini sudah dilakukan proses pengadaan, adapun permasalahan yang dihadapi dalam pengadaan mesin operasional dan pengadaan alat promosi yang tidak bias dipenuhi pada Tahun anggaran 2021 pada sentra IKM rendang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Item barang yang tidak dapat terpenuhi oleh pihak ketiga;
- b. Spek teknis pemenang tender tidak sesuai dengan yang ditawarkan;
- c. Dokumen asli pemenang belum lengkap;
- d. Barang yang tersedia dipasaran mengalami lonjakan harga.

Solusi :

- a. Paket pekerjaan/item pekerjaan lebih disederhanakan;
- b. Proses lelang/tender lebih awal;
- c. Perencanaan pekerjaan yang lebih matang.

Demikian review evaluasi pelaksanaan program kegiatan di Tahun 2021 adalah terlaksana dengan cukup baik dengan capaian kinerja 59,69%. Mendukung kebijakan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan yang lebih matang berdasar evaluasi tahun sebelumnya perlu di ambil kebijakan lanjutan dalam memaksimalkan target program/kegiatan pelaksanaan.

Langkah kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil adalah :

- a. Melakukan review/telaahan ulang terhadap target program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Renstra OPD
- b. Merencanakan target fisik dan keuangan maksimal sebanyak pada tahun sebelumnya

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 dan Capaian Kinerjanya dapat dilihat pada tabel II.1.

Tabel II.1

**EVALUASI HASIL PELAKSANA RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D DESEMBER TAHUN 2021
KOTA PAYAKUMBUH**

PERANGKAT DAERAH : DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Realisasi Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 X 100%	
1.01	TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN			52,215,959,771		2,822,367,566		9,384,278,295		5,601,544,343		59.69	-	-	-	-
	URUSAN TENAGA KERJA			21,026,039,164		1,181,276,173		3,183,623,612		2,961,008,222		93.01	-	-	-	-
	I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM		2,849,618,953	87,39	556,349,586	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1. Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah benda pos dan jasa pengiriman surat	2,116 lbr	11,308,000	295	1,774,000		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan	74 rek	46,195,324	12	18,955,382		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/opersional	Jumlah kendaraan yang dibayarkan pajak	36 unit	8,777,750	11	2,112,250		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4. Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa pengelola administrasi keuangan yang dibayar	123 org	803,602,750	25	226,451,000		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rencana Kerja Tahun 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Realisasi Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 X 100%	
	5. Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jenis bahan-bahan kebersihan kantor yang dibeli	102 jenis	21,235,351	26	5,482,505		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6. Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang dibeli	214 jenis	74,643,403	54	23,790,216		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibeli	41 jenis	119,683,005	12	30,644,155		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	37 jenis	7,841,715	8	1,383,565		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	20 unit	101,500,000		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang dibeli	4,518 koran	26,466,075	878	4,795,500		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11. Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah pelayanan makan minum rapat dan tamu yang disediakan	9,956 porsi	159,524,080	3000	44,309,600		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	169 kali	1,112,162,620	25	88,452,513		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13. Penyediaan tenaga administrasi dan teknis perkantoran	Jumlah THL yang dibayarkan	13 orang	356,678,880	4	108,198,900		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Kondisi Sarana dan Prasarana Perkantoran Dalam Keadaan Baik		531,218,456	80%	105,024,950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rencana Kerja Tahun 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Realisasi Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 X 100%	
	1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibeli	6 unit	106,842,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Pengadaan mobilier	Jumlah mobilier yang dibeli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional kantor	29 unit	372,092,956	13	89,750,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja kantor yang dibayarkan	47 unit	30,678,750	38	9,669,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5. Pemeliharaan rutin/berkala mobilier	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala mobilier yang dibayarkan	50 unit	21,604,750	30	5,604,850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah perbaikan toilet dan partisi pengecatan kantor yang dibayarkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN Berpakaian Dinas dengan Atribut Lengkap		57,594,000	100%	17,542,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	129 orang	57,594,000	39	17,542,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat		45,115,785	A	13,172,725	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rencana Kerja Tahun 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Realisasi Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 X 100%	
	1. Penyusunan laporan pencapaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	Jumlah pembuatan LAKIP, LKPJ, LPPD dan laporan yang tersusun	28 dok	18,720,660	4	5,924,350		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen pelayanan publik	Jumlah SOP, RENJA, RENSTRA, IKM dan IPM OPD yang tersusun	28 dok	26,395,125	4	7,248,375		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM	90	11,374,718,436		-	89	2,974,277,020	89	2,761,192,981	100	92.84	-	-	-	-
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja program/kegiatan	80 %	299,554,060			80%	108,081,190	100%	105,397,130	100	97.52				
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan terhadap aliran kas	80 %	5,072,431,544			100%	2,368,734,186	100%	2,194,167,318	100	92.63				
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap	100 %	10,000,000			-	-	-	-	100	-				
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana penunjang operasional Kantor	80 %	390,957,640			100%	233,684,240	80%	207,416,667	100	88.76				
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ASN Yang Memakai Barang Milik Daerah	100 %	5,082,522,120			-	-	-	-	100	-				
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan sarana penunjang operasional kantor	80 %	288,375,872			80%	148,338,804	80%	141,232,362	100	95.21				

Rencana Kerja Tahun 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Realisasi Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 X 100%	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan kendaraan dinas/operasional yang dibayarkan	80 %	230,877,200			80%	115,438,600	100%	112,979,504	100	97.87				
	V. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga kerja	- Jumlah Tenaga Kerja Yang Berwirausaha	111 org	1,803,502,841	0	3,296,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- Jumlah Tenaga Kerja Yang Diserap Wirausaha	166 org		33 org											
	1. Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	1. Jumlah peserta pelatihan menjahit tingkat pengembangan gorden & bad cover 2. Jumlah peserta pelatihan menjahit tingkat pengembangan busana 3. Jumlah peserta pelatihan elektronik 4. Jumlah peserta pelatihan seleksi magang ke Jepang 5. Jumlah peserta pelatihan las 6. Jumlah peserta pelatihan desainer 7. Jumlah peserta pelatihan pengolahan daging sapi 8. Jumlah peserta pelatihan sepeda motor 9. Jumlah peserta pelatihan tata boga	307 org	1,757,365,641	0	3,296,500										

Rencana Kerja Tahun 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Realisasi Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 X 100%	
	2. Validasi database tenaga kerja daerah	Jumlah validasi pemutakhiran data tenaga kerja Kota Payakumbuh	10 buku	46,137,200	-	-					-	-	-	-	-	-
	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (RTK) yang disusun	1 dok	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (RTK) yang disusun	1 dok	1,000,000			-	-	-	-	-	-				
	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja yang berwirausaha	111 org	145,297,890	-	-	25 orang	73,148,945	20 orang	69,729,350	80	95.33	-	-	-	-
		Jumlah tenaga kerja yang diserap wirausaha	120 org		-	-	45 orang		35 orang		77.78		-	-	-	-
	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit kompetensi	Jumlah pencari kerja yang dilatih dan bersertifikasi	50 org	145,297,890	-		25 orang	73,148,945	25 orang	69,729,350	100	95.33	-	-	-	-
	VI. Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	261 org	3,775,237,564	1030 org	459,585,812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1. Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	Jumlah penerima informasi pasar tenaga kerja	503 org	381,073,016	3	112,130,412					-	-	-	-	-	-
	2. Penyiapan tenaga kerja siap pakai	Jumlah penempatan tenaga kerja siap pakai	66 org	598,387,711		-					-	-	-	-	-	-
	3. Fasilitasi penempatan tenaga kerja ke luar propinsi	Jumlah penempatan tenaga kerja ke luar propinsi	168 org	2,795,776,837	20	347,455,400					-	-	-	-	-	-

Rencana Kerja Tahun 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Realisasi Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 X 100%	
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	261 org	229,173,974	-	-	239 orang	114,579,857	215 orang	110,235,391	89,96	96.21	-	-	-	-
	Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencari kerja yang dimagangkan	40 org	1,999,680			-	-	-	-	-	-				
	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di Bursa Kerja	200 org	227,174,294			200 orang	114,579,857	465 orang	110,235,391	232,5	96.21				
	VII. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Jumlah Penurunan Angka PHK	52 org	170,325,425	34 org	26,304,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1. Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	1. Jumlah kasus perselisihan antara pekerja dengan pemberi kerja yang difasilitasi 2. Jumlah pemetaan kerawanan hubungan industrial diperusahaan yang disusun 3. Jumlah perusahaan peserta bimtek syarat kerja	17 kasus	52,105,870	-						-	-	-	-	-	-
	2. Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja	1. Jumlah peserta sosialisasi peraturan tentang keselamatan dan kesehatan kerja 2. Jumlah penyuluhan oleh tim terpadu kepatuhan norma ketenagakerjaan	295 kasus/perusahaan	118,219,555	4	26,304,600					-	-	-	-	-	-

Rencana Kerja Tahun 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Realisasi Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 X 100%	
	Program Hubungan Industrial	Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan	12 kasus	43,235,840	-	-	4 kasus	21,617,790	3 kasus	19,850,500	100	91.82	-	-	-	-
	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan	12 kasus	43,235,840			3 kasus	21,617,790	3 kasus	19,850,500	100	91.82				
	URUSAN PERINDUSTRIAN			31,189,920,607		1,641,091,393		6,200,654,683		2,640,536,121			-	-	-	-
	VIII. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Persentase Industri Yang Menerapkan Standarisasi Mutu Produk	2,75 %	1,174,134,745	3,75%	80,314,950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1. Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas	Jumlah peningkatan daya saing melalui pelaksanaan sertifikasi, legalitas dan jaminan mutu produk dengan kegiatan sbb : 1. Jumlah fasilitasi sertifikasi halal, HAKI (Pendaftaran Merk) 2. Jumlah uji labor pada makanan	116 IKM	390,210,437	26	53,103,750					-	-	-	-	-	-

Rencana Kerja Tahun 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Realisasi Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 X 100%	
	2. Pengembangan sistem inovasi teknologi industri	1. Jumlah peserta pelatihan /workshop penguatan peralatan produksi bagi IKM melalui TTG 2. Jumlah peserta sosialisasi dan workshop bata ringan bagi IKM batu bata Kota Payakumbuh	60	126,542,255	10	27,211,200					-	-	-	-	-	-
	3. Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi	1. Jumlah peserta pelatihan fashion/rancang busana kolaborasi tenun, sulam dan bordir 2. Jumlah bantuan bahan percontohan bordir 3. Jumlah magang usaha kerajinan	45	657,382,053		-					-	-	-	-	-	-
	IX. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Persentase Promosi Produk Yang Diperoleh Umpa Balik	55,00	%	66,127,650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1. Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri	Jumlah pembinaan IKM pendamping GKM dan penerapan Good Manufacturing Practices (GMP) di IKM	10	IKM	64,048,150	-	-				-	-	-	-	-	-
	2. Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang industri kecil dan menengah	Jumlah dokumen kajian dan aksi pengembangan makanan spesifik daerah (rendang) menuju pasar global	15	IKM	2,079,500	-	-				-	-	-	-	-	-

Rencana Kerja Tahun 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Realisasi Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 X 100%	
	X. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Persentase Industri Yang Menerapkan Teknologi Tepat Guna	3,35	%	1,146,434,026	2,3%			-	-	-	-	-	-	-	-
		Persentase Peningkatan Nilai Produksi	3,00	%		13,8%					-	-	-	-	-	-
	1. Pembinaan kemampuan teknologi industri	1. Jumlah IKM terbina melalui klinik konsultasi bisnis 2. Jumlah peserta pelatihan peningkatan daya saing melalui efesiensi dan efektifitas usaha	145	IKM	615,512,475	25	37,319,825				-	-	-	-	-	-
	2. Pengembangan dan pelayanan teknologi industri	Jumlah peserta pelatihan kerajinan tenun/rajut	68	IKM	332,032,003	3	4,357,225				-	-	-	-	-	-
	3. Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur	1. Jumlah peserta workshop dan sertifikasi kompetensi untuk IKM 2. Jumlah peserta workshop peningkatan penguasaan teknologi IKM	40		198,889,548	-	-				-	-	-	-	-	-
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase industri yang menerapkan Teknologi Tepat Guna	3,35	%	7,318,307,650	-	-	3,30%	6,163,424,653	2,1%	2,603,701,031	63,64	42.24	-	-	-
		Persentase sentra/klaster industri yang tertata	60,00	%		-	40.00 %		40.00 %		100	-	-	-	-	-

Rencana Kerja Tahun 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Realisasi Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 X 100%	
	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri kabupaten/Kota	- Jumlah dokumen penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industri yang disusun - Jumlah dokumen penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industri yang disusun (UPTD P3R)	10 dok	7,318,307,650			5 dok	6,163,424,653	5 dok	2,603,701,031	100	42.24				
	XI. Program Penataan Struktur Industri	Jumlah Produk Industri Yang Mendapat Sertifikat Produk	6 bh	21,350,022,476		1,519,099,393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1. Kebijakan keterkaitan industri hulu hilir	Jumlah sinergisitas pembinaan dan pengembangan IKM dengan Dekranasda Kota Payakumbuh	4 tahun	1,302,601,286	1	199,681,330					-	-	-	-	-	-
	2. Penyediaan sarana dan prasarana klaster industri	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana sentra industri	8 paket	14,588,615,760		-					-	-	-	-	-	-
	3. Operasional rumah produksi dan galery tenun	Operasional rumah produksi dan galery tenun	2 tahun	343,916,938		-					-	-	-	-	-	-
	4. Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hilir	Jumlah keikutsertaan event	14 event	1,759,776,705	1	202,110,990					-	-	-	-	-	-
	5. Revitalisasi sentra IKM Kota Payakumbuh	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana sentra IKM Kota Payakumbuh	1 sentra	432,350,079		-					-	-	-	-	-	-

Rencana Kerja Tahun 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Realisasi Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 X 100%	
	6. Operasional sentra rendang	Operasional sentra IKM rendang	2 tahun	2,875,802,533	1	1,117,307,073					-	-	-	-	-	-
	7. Pendataan potensi IKM Kota Payakumbuh	Dokumen data IKM Kota Payakumbuh	1 dok	46,959,175	-	-					-	-	-	-	-	-
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase industri yang menerapkan standarisasi mutu produk	2,75 %	74,460,060	-	-	2,50%	37,230,030	2,2%	36,835,090	88	98.94	-	-	-	-
		Jumlah produk industri yang mendapat sertifikat produk	1 bh		-	-	1 buah		9 buah		900	-	-	-	-	-
	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku industri yang difasilitasi	20 IKM	74,460,060			10 IKM	37,230,030	9 IKM	36,835,090	90	98.94				
	XII. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Persentase Sentra/Klaster Industri Yang Tetata	60 %	40,434,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1. Penyediaan sarana informasi yang dapat di akses masyarakat	Jumlah penyediaan informasi sentra rendang	1	40,434,000	-	-					-	-	-	-	-	-
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah Izin Usaha Yang Diawasi Dari Jumlah Izin Yang Dikeluarkan 2 Tahun Sebelumnya	25 IUI	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rencana Kerja Tahun 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Realisasi Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 X 100%	
	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri Untuk Informasi Industri IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyediaan informasi industri yang disusun	3 dok	20,000,000			-	-	-	-	-	-				

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh, maka Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh mempunyai Struktur Organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Tugas Pokok :

Membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di dibidang Tenaga Kerja dan Perindustrian.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian;
- d. Pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Dinas

Tugas Pokok :

Merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Fungsi :

- a. Perencanaan operasional urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- b. Pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

- d. Pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan dinas;
- e. Pengelolaan informasi publik terkait kebijakan dinas; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris membawahi 2 (dua) Sub Bagian, yaitu :

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 2) Sub Bagian Program dan Keuangan

3. Bidang Tenaga Kerja

Tugas :

Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas dibidang Tenaga Kerja.

Fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja Bidang Tenaga Kerja;
- b. Penyelenggaraan kegiatan Bidang Tenaga Kerja;
- c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Tenaga Kerja;
- d. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Tenaga Kerja; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Tenaga Kerja terdiri atas 3 (tiga) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi, yaitu :

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pelatihan Tenaga Kerja
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja

4. Bidang Perindustrian

Tugas :

Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di Bidang Perindustrian.

Fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja Bidang Perindustrian;
- b. Penyelenggaraan kegiatan Bidang Industri;
- c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Industri;
- d. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Industri;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Perindustrian terdiri atas 3 (tiga) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi, yaitu :

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Industri Pangan
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Industri Sandang dan Kerajinan
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Industri Logam, Elektronika, Kimia dan Bahan Bangunan

5. UPTD Pusat Pelayanan dan Pengembangan Rendang (P3R)

Tugas :

Melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dibidang Pelayanan dan Pengembangan Rendang.

Fungsi :

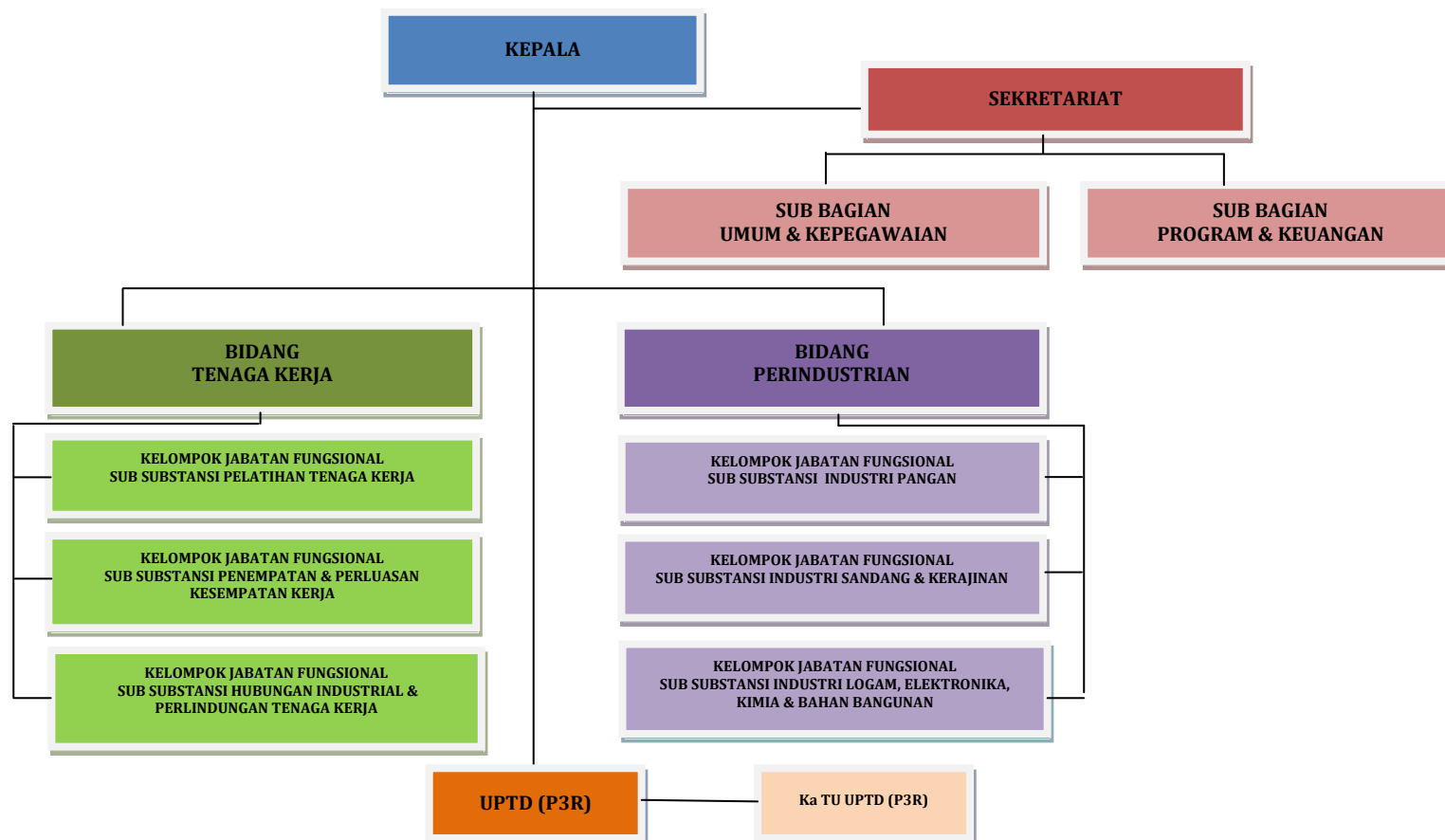
- a. Penggerakan pembangunan Industri Kecil dan Menengah;
- b. Penggerakan peran serta dan pemberdayaan IKM;
- c. Pelaksanaan Pelayanan dan Pengembangan Rendang di Kota Payakumbuh.

UPTD Pusat Pelayanan dan Pengembangan Rendang (P3R) mempunyai :

- Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Adapun susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dalam bentuk bagan struktur adalah sebagai berikut :

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 51 TAHUN 2021
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN



A. Urusan Ketenagakerjaan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Urusan Wajib Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian ditetapkan 1 (satu) IKU untuk urusan Ketenagakerjaan yaitu :

1. Persentase Penyerapan Tenaga Kerja, dengan rumusan jumlah penduduk usia kerja Tahun n dibagi jumlah angkatan kerja Tahun n dikali seratus persen

Hasil analisis pencapaian indikator Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Tahun 2021 realisasi sebesar 98,96% dari target yang ditetapkan sebesar 93,55%, yaitu 44.451 orang jumlah penduduk usia kerja Tahun 2021 dengan 44.916 orang jumlah angkatan kerja Tahun 2021.

Faktor pendukung dan program tersebut diatas melalui APBD Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi dengan Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi. Untuk Tahun 2021 kegiatan berupa pelatihan pengembangan busana dengan peserta 25 orang, yang telah dilaksanakan pada tanggal 21 Juni sampai dengan 3 Juli 2021.
2. Program Penempatan Tenaga Kerja pada Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja dengan Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online dan Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online.
 - Kegiatan pembuatan AK-1 bagi pencari kerja yang dilakukan di Mall Pelayanan Publik (MPP), Informasi Bursa Kerja Online tentang lowongan pekerjaan melalui sistem Ketenagakerjaan (SISNAKER) Kementerian Tenaga Kerja. Melalui aplikasi Sisnekaer ini, seluruh masyarakat pencari kerja dan masyarakat usia kerja dapat memperoleh segala bentuk informasi terkait dengan ketenagakerjaan, seperti Lowongan pekerjaan, pendidikan dan pelatihan dll. Selain melalui aplikasi Sinaker, penyebaran informasi bursa kerja melalui media sosial seperti Facebook, Instagram Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh.

- Kegiatan Sosialisasi Bursa Kerja terhadap siswa tamatan SMK Se-Kota Payakumbuh dengan jumlah peserta sebanyak 180 orang.
- 3. Program Hubungan Industrial pada Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan.
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
Dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dimana dari 3 kasus yang ditargetkan untuk difasilitasi penyelesaiannya hanya 3 kasus yang masuk.

B. Urusan Perindustrian

Indikator Kinerja Utama (IKU) Urusan Pilihan Perindustrian, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian ditetapkan 1 (satu) IKU untuk urusan Perindustrian yaitu :

1. Peningkatan Nilai Produksi, dengan rumusan nilai produksi Th (n)-nilai produksi Th (n-1) dibagi nilai produksi Th (n-1) kali seratus persen
Hasil analisis pencapaian indikator Persentase Peningkatan Nilai Produksi Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 15,32% dari target yang ditetapkan sebesar 2,50%. Yaitu nilai produksi Tahun 2020 sebesar Rp. 257.089.350.000,- mengalami kenaikan untuk Tahun 2021 sebesar Rp. 296.463.459.000,-.

Faktor pendukung dan program tersebut diatas melalui APBD Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri pada Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri, Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri, Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan

Peran Serta Masyarakat, Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri dan Sub Kegiatan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2021 yaitu :

- Mengikuti event Indonesia Fashion Chamber
Dalam rangka peningkatan promosi dan pemasaran Tenun Balai Panjang Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Dekranasda Kota Payakumbuh mengikuti Event ashion Chamber pada tanggal 27 Oktober 2021 di Jakarta Convention Center yang bekerjasama dengan Designer Nasional Kepresidenan Tuti Adib yang menampilkan baju muslimah dengan menggunakan bahan Tenun Balai Panjang.
- Mengikuti Acara Temu Bisnis di Pekan Baru
Mengikuti acara Temu Bisnis di Pekanbaru pada tanggal 10 s.d 13 November 2021 yang diikuti oleh unsur IKM Tenun Balai Panjang (Effendi) dan IKM Rajut/Rajut Fayari (Latifa Maya Sari) dan Pembina IKM Tenun yaitu Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh melalui Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dan Pengurus Dekranasda Kota Payakumbuh.
- Melaksanakan Study Komparatif Kerajinan Rajut dan Tenun
Dalam rangka Peningkatan keterampilan/keahlian, wawasan dan pengetahuan IKM dan Pembina dilaksanakan Study Komparatif Kerajinan Rajut ke Yogyakarta (Dowa dan Kaybag) dan Tenun ke Solo (Bilqis) yang merupakan rumah produksi designer yang membina dan mempromosikan Tenun Balai Panjang. Study Komparatif ini dilaksanakan pada tanggal 23 November s.d 26 November 2021 yang diikuti oleh IKM rajut Latifah Maya Sari (Rumah Rajut Fayari) dan Tenaga Desain Tenun beserta Pembina IKM Kota Payakumbuh.
Study Kompoaratif ke Kaybag
Di Kaybag mempelajari tentang manajemen pengrajin dan kualitas rajutan sesuai dengan selera pasar.
- Melaksanakan Study Komparatif Tenun ke Provinsi Riau (Kabupaten Siak) dan Bengkalis)

Study Komparatif Tenun ke Provinsi Riau yaitu ke Kabupaten Siak dan Kabupaten Bengkalis dilaksanakan dalam rangka peningkatan pengetahuan, wawasan dan keahlian aparat Pembina Tenun Balai Panjang pada tanggal 08 s.d 11 Desember 2021.

- Melaksanakan pembinaan ke IKM Sandang dan Kerajinan
Pembinaan dilaksanakan oleh Ketua Dekranasda Kota Payakumbuh Ny. DR. Henny Riza Falepi beserta pengurus ke IKM-IKM Sandang dan Kerajinan seperti D"fitranats dan Rumah Rajut Fayari.
- Mengikuti Rakornas Dekranas Dalam Rangka HUT Dekranas
Mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Dewan Kerajinan Nasional dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2021 secara Virtual.
- Mengikuti Pameran Online Rumah Kriya Asri
Pameran online ini di prakarsai oleh Dekranas Pusat yang dilaksanakan selama bulan September 2021 yang di pandu dan di bimbing oleh Designer nasional Musa Widyatmodjo. Dimana dibawah bimbingan Pak Musa produk-produk kerajinan Kota Payakumbuh sangat diminati pada pameran ini dan semua produk habis terjual.
- Mengikuti Memasak Rendang Se Dunia secara Virtual
Memasak Rendang se Dunia secara Virtual dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2021
- Kegiatan Pelatihan dan Workshop penguatan peralatan produksi bagi IKM melalui TTG
Pelaksanaan pelatihan dilaksanakan selama 4 hari dari tanggal 15 Juni sampai dengan 18 Juni 2021 yang dilaksanakan di Bengkel Surau Pandam Teknik di Kelurahan Payobasuung Kecamatan Payakumbuh Timur dengan Instruktur pelatihan/narasumber dari CV. CHERRY SARANA AGRO yaitu Bapak Ir. M. Surya dengan peserta sebanyak 10 orang. Kegiatan ini difokuskan pada materi penjelasan model TTG yang dibuat berupa mesin chopper dengan sistem berkelompok.

- Kegiatan Workshop Rancang Busana Aplikasi Bordir, dilaksanakan pada tanggal 14 Juni sampai dengan 18 Juni 2021 di Rumah Kreatif Bersama (RKB) BNI di Komplek Pondok Promosi Ngalau Indah dengan Instruktur :
 - Aisyah Rupnidah Chan : designer Nasional
 - Dra. Wismarni : Guru Tata Busana SMK 3 Payakumbuh
 - Dra. Yusra Sawir : Guru Tata Busana SMK 3 PayakumbuhDengan peserta 20 orang yang berasal dari IKM Jahit/Bordir Kota Payakumbuh
 - Kegiatan Workshop Diversifikasi Produk Rendo Bangku, dilaksanakan pada tanggal 13 September sampai dengan 17 September 2021 di Aula Sentra Rendang Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Jalan Gelatik Kelurahan Tigo Koto Diate Kecamatan Payakumbuh Utara dengan Instruktur : Ibu Ritha Anggraini.
Dengan peserta 10 orang yang berasal dari IKM Kerajinan Rendo Bangku dan Rajut Kota Payakumbuh.
2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota pada Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
- Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2021 yaitu :
- Fasilitasi IKM dalam pendaftaran sertifikat halal, untuk Tahun 2021 yang ditarget pendaftaran ternyata tidak tercapai 100%, dari target 10 IKM/Kelompok Produk hanya 9 IKM/Kelompok Produk yang berhasil melakukan pendaftaran dan berhasil memperoleh STTD untuk lanjut ke proses audit. Semua IKM yang sudah berhasil melakukan pendaftaran yaitu 9 IKM/Kelompok Produk telah melaksanakan proses audit oleh LPH yaitu LPPOM MUI Sumbar. Setelah dilakukan audit, maka laporan hasil audit disampaikan oleh LPH dalam hal ini LPPOM

MUI kepada Komisi Sidang Fatwa MUI untuk dibahas dan diputuskan ketetapan halal.

Kontribusi bidang Tenaga kerja dan Industri tidak lepas dari dinamika perkembangan sektor tersebut dari tahun ke tahun.

Untuk Tahun Anggaran 2023, merupakan tahun ke 1 (pertama) dari Rencana Strategis Empat Tahun (2023-2026) yang memuat Program dan Kegiatan untuk menindaklanjuti pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh periode 2023-2026 dalam bentuk Rencana Kerja (RENJA) tahunan yang dilengkapi indikator capaian kinerja terukur dari masing-masing program dan kegiatan untuk menilai tingkat keberhasilan kinerja Dinas berdasarkan Perubahan Rencana Strategis yang telah ditetapkan. Capaian Kinerja berdasarkan indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dapat dilihat pada tabel II.2.

Tabel II.2
KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

PERANGKAT DAERAH : DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	IKU	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Proyeksi	Catatan Analisis
						2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Menurunnya angka pengangguran			Tingkat pengangguran	%	6.92	6.77	6.62	6.47		3,45	3,78	4.11	6,68			
				Persentase penempatan tenaga kerja formal	%	35.68	43.68	51.00	57.00		38,49	43,87	51.17	65,52			
				Persentase penyerapan tenaga kerja informal	%	5.19	15.19	25.00	33.00		5,22	17,22	26.17	43,89			
				Persentase penyerapan tenaga kerja	%					93,55					98,96	93,75	
2	Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB			Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	%	5.98	6.00	6.02	6.08		5,98	5,35	5.60	6,6			
				Persentase peningkatan nilai produksi	%	1.50	1.50	1.50	2.00	2,50	2,15	1,59	1.65	-13,8%	15,32	3.00	
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah			Hasil penilaian AKIP PD oleh Inspektorat	Nilai	BB	BB	A	A	A	BB	A	A	A	A	A	

3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Sebelum dapat menentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, maka terlebih dahulu harus kita ketahui permasalahan apa saja yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian yaitu :

Permasalahan Urusan Tenaga Kerja

1. Masih rendahnya penyerapan tenaga kerja;
2. Masih rendahnya tingkat pendidikan pencari kerja;
3. Masih rendahnya jumlah wirausahawan baru sebagai potensi untuk penyediaan lapangan kerja;
4. Meningkatnya jumlah pengangguran terdidik, karena tidak memiliki kompetensi/kompetensi tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
5. Belum meratanya perlindungan tenaga kerja (terutama hak-hak tenaga kerja, jaminan kesehatan/keselamatan kerja, proteksi keselamatan kerja, hak-hak pensiun);
6. Belum maksimalnya kualitas dan jaringan kerjasama tenaga kerja ke luar negeri dan luar daerah;
7. Masih adanya hubungan kerja yang kurang harmonis antara pemberi kerja dan pekerja;
8. Masih rendahnya daya saing pencari kerja siap pakai;
9. Masih rendahnya pertumbuhan wirausaha baru;
10. Belum memadainya kapasitas wirausaha untuk pengembangan usaha;
11. Masih rendahnya kesadaran pemahaman akan kewajiban mendaftarkan lowongan kerja ke Disnakerperin;
12. Masih kurangnya pemahaman tentang peraturan perundangan-undangan ketenagakerjaan oleh pekerja dan pemberi kerja;

Permasalahan Urusan Perindustrian

1. Rendahnya produktifitas usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM), disebabkan oleh :
 - 1) Belum optimalnya penerapan teknologi industri;
 - 2) Rendahnya kualitas SDM pelaku industri.
2. Terbatasnya kualitas produk IKM, disebabkan oleh:
 - 1) Masih rendahnya kualitas input bahan baku dan bahan penolong;

- 2) Masih rendahnya mutu produk akibat dari rendahnya standadisasi proses produksi :
- 3) Masih kurangnya sinergisitas antara pelaku industri dan pemasok bahan baku yang berkualitas.
3. Belum optimalnya pemasaran produk Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kota Payakumbuh, disebabkan oleh :
 - 1) Promosi produk yang belum optimal;
 - 2) Belum adanya sistem khusus yang mendukung pemasaran produk-produk IKM Kota Payakumbuh;
 - 3) Belum adanya sinergi antara industri kecil, menengah dan besar dalam kerjasama produksi maupun pemasaran.
4. Minimnya akses modal bagi pelaku usaha :
 - 1) Kebijakan investasi (penanaman modal) yang belum maksimal;
 - 2) Belum kuatnya lembaga/kelompok industri pada kegiatan usaha bersama.

Permasalahan teknis operasional kegiatan yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh sebagai berikut :

1. Perlunya dokumen perencanaan yang sesuai dan selaras dalam pembangunan tenaga kerja dan perindustrian dengan dokumen perencanaan diatasnya.
2. Perlunya koordinasi berbagai pihak terkait dalam rangka penyelenggaraan pembangunan tenaga kerja dan industri.
3. Peran serta masyarakat dalam perencanaan, partisipatif belum berjalan secara optimal.
4. Data dan informasi yang berhubungan dengan ketenagakerjaan dan perindustrian dan pembinaan potensi daerah perlu ditingkatkan.
5. Perluasan tenaga kerja dan wirausaha perlu ditingkatkan.
6. Sistem hubungan industry dan perusahaan yang harmonis masih perlu ditingkatkan.
7. SDM tenaga kerja dan pelaku usaha masih perlu ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan.
8. Kemampuan inovasi penerapan Teknologi Tepat Guna dan pengetahuan tentang manajemen pengelolaan usaha industri perlu ditingkatkan.
9. Terbatasnya penguasaan teknologi pengembangan desain kemasan serta penanganan dan pengetahuan bahan baku/bahan penolong pada industri.

10. Masih kurangnya pemahaman pelaku usaha industri tentang manfaat dari peningkatan standarisasi mutu produk.

Untuk mendukung terwujudnya kinerja pembangunan yang optimal dari suatu institusi sangat dipengaruhi oleh pencapaian pelaksanaan fungsi pelayanan dan tugas pokok yang dilaksanakan. Dalam implementasinya ke dua unsur penting dari keberadaan suatu institusi pemerintah tersebut berdampak langsung pada masyarakat luas, karena sasaran akhir dan tujuan utamanya adalah memberdayakan semua aspek dan potensi kehidupan masyarakat untuk terwujudnya kesejahteraan yang dicita-citakan bersama, terutama bagi institusi pemerintah yang memiliki fungsi pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh yang mempunyai kewenangan mengelola 2 (dua) urusan pemerintahan dalam struktur Pemerintahan Kota Payakumbuh yaitu 1 urusan wajib (Tenaga Kerja) dan 1 urusan pilihan (Perindustrian) belum sepenuhnya dapat melaksanakan fungsi pelayanan dan tugas pokoknya secara optimal. Hal ini tidak terlepas dari berbagai kendala dan permasalahan dalam lingkup pelaksanaan fungsi pelayanan dan tugas pokok tersebut. Kendala dan permasalahan tersebut berasal dari faktor-faktor yang berpengaruh dalam mendukung fungsi pelayanan dan pelaksanaan tugas pokok, baik itu berasal dari internal institusi Dinas maupun eksternalnya.

A. KEKUATAN DAN KELEMAHAN INTERNAL

Kekuatan

- Tersedianya sumber daya aparatur.
- Tersedianya Dasar Hukum dalam pelaksanaan tugas.
- Dukungan prasarana dan sarana untuk bekerja.
- Tersedianya Dokumen Perencanaan Jangka Pendek dan Menengah.
- Struktur organisasi Dinas sebagai wadah untuk melaksanakan Tupoksi.
- Tersedianya sistem administrasi kedinasan yang baku.

Kelemahan

- Kualitas sumber daya aparatur yang belum merata.
- Terbatasnya jumlah anggaran yang tersedia.
- Jaringan system informasi ketenagakerjaan belum tersedia.
- Kurangnya tenaga fungsional di bidang Tenaga Kerja.

- Kurangnya tenaga fungsional di bidang Perindustrian.
- Pelaku usaha/pemberi kerja tentang kewajiban melaporkan lowongan kerja masih sangat rendah.
- Sistem yang dikembangkan Pemerintah Pusat mengenai pendataan Pencari Kerja masih belum sempurna.
- Belum optimalnya ketersediaan sarana dan fasilitas.
- Terbatasnya ketersediaan anggaran dalam APBD untuk pelatihan, pendidikan dan pengembangan bagi Tenaga kerja dan IKM.
- Belum tertatanya administrasi kedinasan secara baik.
- Belum mendukungnya struktur organisasi Dinas terhadap capaian fungsi pelayanan dan tugas pokok.

B. PELUANG DAN TANTANGAN EKSTERNAL

Peluang

- Potensi daerah lain dalam menyerap tenaga kerja.
- Tingginya motivasi masyarakat untuk berwira usaha.
- Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh dalam 3 tahun terakhir.
- Letak geografis Payakumbuh yang strategis pada perlintasan jalur ekonomi antara provinsi Sumatera Barat dengan Riau.
- Kebijakan Nasional tentang Tenaga Kerja dan Perindustrian.
- Meningkatnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja.
- Berkurangnya angka pengangguran.
- Terbinanya koordinasi yang baik dengan instansi vertikal di tingkat provinsi.

Tantangan

- Tingginya angkatan kerja yang mencari pekerjaan.
- Tingkat keterampilan tenaga kerja kurang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
- Keterampilan dan produktifitas tenaga kerja yang rendah.
- Masih adanya pelanggaran norma dan syarat kerja.
- Akses mendapatkan permodalan bagi peserta pelatihan kerja masih relative sulit/terkendala persyaratan.

- Belum optimalnya peningkatan daya saing usaha, terutama untuk IKM.
- Belum sinergisnya pengelolaan limbah industri kecil dengan lintas sektoral.
- Minimnya investasi di Sektor Sarana Perindustrian.

Dari inventarisasi faktor-faktor internal dan eksternal tersebut di atas dapat diperoleh gambaran tentang penyelenggaraan fungsi pelayanan menyangkut kewenangan dan Pelaksanaan tugas pokok Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh, termasuk permasalahan-permasalahan dilingkup implementasinya.

Secara umum kendala dan permasalahan dalam penyelenggaraan fungsi pelayanan dan tugas pokok dapat dikelompokkan pada permasalahan teknis dan non teknis. Permasalahan yang bersifat teknis terkait dengan belum maksimalnya kontribusi faktor internal terutama potensi kekuatan dan belum ditindaklanjutinya solusi kelemahan institusi Dinas dalam mendukung tercapainya optimalisasi fungsi pelayanan. Kondisi ini terlihat dari belum meratanya kualitas aparatur yang berdampak pada dukungan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas yang muaranya adalah tidak tercapainya target kinerja yang sudah ditetapkan. Dari sisi penyelenggaraan tugas pokok khususnya tugas pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja serta pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan IKM, belum semuanya dapat terlaksana dengan mempedomani kebijakan yang telah dirumuskan. Beberapa faktor yang menjadi kendalanya, antara lain terbatasnya anggaran yang tersedia, sarana dan fasilitas kerja belum lengkap, untuk beberapa sasaran kerja belum didukung oleh payung hukum yang mendasarinya seperti Pola Pengembangan IKM di daerah. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh, dimana 1 (satu) urusan pilihan yaitu urusan Perindustrian dijadikan dalam satu kewenangan bidang Industri. Situasi ini memberi ruang yang sempit bagi peningkatan fungsi pelayanan dan penyelenggaraan tugas pokok, Alasan yang mendasar adalah tumpang tindihnya tupoksi di tataran teknisnya yaitu pada tingkat eselon IV, sehingga cakupan fungsi pelayanan dan tugas pokoknya menjadi lebih luas dan bersifat umum. Fungsi pelayanan pada urusan Tenaga Kerja dan Perindustrian yang bersifat teknis tidak berjalan sebagai mana mestinya.

Dengan keterbatasan dukungan berbagai faktor tersebut di atas dan kompleksitas permasalahan serta dinamika lingkungan pasar yang bersentuhan erat

dengan kepentingan berbagai lapisan masyarakat setiap harinya, maka akan selalu menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan fungsi pelayanan, sehingga fokus pengelolaan urusan Tenaga Kerja dan Perindustrian relatif kecil.

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh merupakan bagian integral dari Pemerintah Kota Payakumbuh, maka dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026 Dinas harus mengacu serta sinkron dan tidak bertentangan dengan kandungan muatan yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 Kota Payakumbuh, karena pada dasarnya Perubahan Renstra Dinas merupakan penjabaran dari kandungan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 sesuai dengan Tupoksi Dinas.

Dengan tersusunnya Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 memberi arah dan muatan yang jelas dalam perumusan dan penyusunan Renstra Tahun 2023-2026 Dinas, karena jabaran yang diuraikan merupakan rincian kongkrit dan mendalam terhadap kandungan berbagai kebijakan pembangunan yang sinergis dengan kewenangan yang diamanatkan.

Dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 telah ditetapkan Tujuan dan Sasaran Kota Payakumbuh :

Tujuan :

Tujuan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Payakumbuh dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah periode 2023-2026 antara lain :

- a. Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas;
- b. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas;
- c. Terwujudnya pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel;
- d. Terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan;
- e. Meningkatnya tata kehidupan masyarakat yang berkarakter dan berbudaya.

Sasaran :

Sasaran untuk tujuan terwujudnya perekonomian yang berkualitas didukung oleh 3 (tiga) sasaran yaitu :

- a. Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran;
- b. Meningkatnya sektor strategis;
- c. Meningkatnya iklim usaha dan investasi di Kota Payakumbuh.

Upaya yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dalam mendukung tercapainya tujuan dan sasaran adalah dalam bentuk mengoptimalkan fungsi pelayanan dan penyelenggaraan tugas pokok. Karena

tujuan dan sasaran tersebut sudah terakomodir dalam tugas pokok dan fungsi Dinas yaitu penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan tugas pembantu di bidang Tenaga Kerja dan bidang Perindustrian.

Dalam inventarisasi faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi penyelenggaraan fungsi pelayanan dan tugas pokok, terdapat beberapa permasalahan dan unsur pendukung untuk terwujudnya capaian tujuan, sasaran dan program yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 sebagaimana yang diamanatkan dalam paparan Renstra Dinas Tahun 2023-2026. Di antara bentuk dukungan yang bersumber dari terlaksananya fungsi pelayanan dan tugas pokok adalah tersedianya program dan kegiatan yang berkesinambungan pada ke dua urusan, Tenaga Kerja dan Perindustrian yang keseluruhan sasaran capaian programnya dalam bentuk pengurangan angka pengangguran dan meningkatkan kesempatan kerja bagi tenaga kerja dan pemberdayaan IKM. Dukungan lainnya berupa tersedianya tenaga/aparatur yang memiliki pengalaman dan pemahaman yang jelas terhadap kondisi tenaga kerja dan IKM serta terbinannya koordinasi yang baik dengan instansi vertikal di tingkat provinsi dan pusat. Sebaliknya terdapat permasalahan-permasalahan yang kalau tidak ditindak lanjuti akan menjadi faktor penghambat capaian tujuan, sasaran dan program pembangunan daerah.

Faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan menjadi isu utama dalam dinamika penyelenggaraan tugas-tugas kedinasan pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh. Dari analisa bobot masing-masing faktor dapat disimpulkan beberapa faktor yang bersifat menghambat/menjadi kendala dalam pelaksanaan fungsi pelayanan dan penyelenggaraan tugas dan juga sebaliknya beberapa faktor menjadi pendukung optimalnya pelaksanaan fungsi dan tugas tersebut. Hasil analisa bobot yang dilakukan terhadap faktor internal dan eksternal (Analisa SWOT) diperoleh beberapa isu utama (**Isu-isu Strategis**) yang menjadi tolak ukur penyelenggaraan fungsi dan tugas kedinasan secara menyeluruh, diantaranya adalah :

1. Masih rendahnya penyerapan tenaga kerja;
2. Masih rendahnya produksi industri pengolahan.

Dari isu-isu utama yang sudah diinput diperoleh satu isu strategis yang akan menjadi gambaran secara menyeluruh terhadap tujuan, sasaran dan kebijakan

yang akan dilaksanakan dan diimplementasikan dalam program dan kegiatan-kegiatan pembangunan sektor Tenaga Kerja dan IKM. Secara perspektif isu strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh untuk mendukung capaian tujuan, sasaran dan Program pada Rencana Strategi (Renstra) Tahun 2023-2026.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh. Di samping itu, dokumen rencana kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dapat dilihat pada tabel II.3.

Tabel II.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023
KOTA PAYAKUMBUH

PERANGKAT DAERAH : DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				3,846,147,487	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				4,714,667,107	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Nilai IKM	90.00	3,460,738,295	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Nilai IKM	90.00	3,996,260,095	
			Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	A				Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	A		
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Capaian Kinerja Program/Kegiatan	80%	96,446,010	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Capaian Kinerja Program/Kegiatan	80%	99,967,810	

Rencana Kerja Tahun 2023

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1)	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	11,469,330	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	11,469,330	
2)	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	14,540,680	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	14,540,680	
3)	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 laporan	70,436,000	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 laporan	73,957,800	
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Keuangan Terhadap Aliran Kas	80%	2,718,577,772	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Keuangan Terhadap Aliran Kas	80%	2,718,577,772	
4)	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 orang	2,454,327,772	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 orang	2,454,327,772	

Rencana Kerja Tahun 2023

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5)	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dok	264,250,000	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dok	264,250,000	
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ASN Berpakaian Dinas dengan Atribut Lengkap	100%	11,157,720	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ASN Berpakaian Dinas dengan Atribut Lengkap	100%	11,157,720	
6)	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	21 paket	11,157,720	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	21 paket	11,157,720	
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Ketersediaan Sarana Penunjang Operasional Kantor	80%	251,794,373	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Ketersediaan Sarana Penunjang Operasional Kantor	80%	518,794,373	
7)	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 paket	2,004,910	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 paket	2,004,910	
8)	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	29 paket	252,000,000	

Rencana Kerja Tahun 2023

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9)	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 paket	12,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 paket	12,000,000	
10)	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	85 paket	48,724,140	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	85 paket	48,724,140	
11)	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	9 paket	20,863,310	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	9 paket	20,863,310	
12)	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 dokumen	6,004,560	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 dokumen	6,004,560	
13)	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	10 laporan	10,500,000	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 laporan	10,500,000	
14)	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 laporan	151,697,453	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 laporan	151,697,453	
15)	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen		Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	15,000,000	

Rencana Kerja Tahun 2023

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase ASN yang Memakai Barang Milik Daerah	100%	33,000,000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase ASN yang Memakai Barang Milik Daerah	100%	298,000,000	
16)	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 unit		Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 unit	200,000,000	
17)	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel		Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	1 unit		Sub Kegiatan Pengadaan Mebel		Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	1 unit	15,000,000	
18)	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	33,000,000	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	33,000,000	
19)	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit		Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	50,000,000	
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor	80%	239,471,180	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor	80%	239,471,180	
20)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	2,210,000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	2,210,000	

Rencana Kerja Tahun 2023

No	Rancangan Awal RKPd Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	120,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	120,000,000	
22)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 laporan	117,261,180	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 laporan	117,261,180	
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional dan Sarana Prasarana Kantor yang Dibayarkan	80%	110,291,240	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional dan Sarana Prasarana Kantor yang Dibayarkan	80%	110,291,240	
23)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	39,190,000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	39,190,000	
24)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 unit	59,400,000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 unit	59,400,000	

Rencana Kerja Tahun 2023

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25)	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	48 unit	5,638,600	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	48 unit	5,638,600	
26)	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 unit	6,062,640	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 unit	6,062,640	
2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang Tersusun	0,8%	59,994,290	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang Tersusun	0,8%	59,994,410	
8	Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RKT)		Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang Tersusun	0,8%	59,994,290	Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RKT)		Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang Tersusun	0,8%	59,994,410	
27)	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro		Jumlah Dokumen Rencana Kerja Makro	1 dok	49,954,370	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro		Jumlah Dokumen Rencana Kerja Makro	1 dok	49,954,490	
28)	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro		Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	1 perusahaan	10,039,920	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro		Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	1 perusahaan	10,039,920	
3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	3,92%	183,210,150	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	3,92%	226,148,340	
9	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi		Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	80%	183,210,150	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi		Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	80%	206,148,450	

Rencana Kerja Tahun 2023

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29)	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	20 orang	183,210,150	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	48 orang	206,148,450	
10	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	70%	-	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	70%	19,999,890	
30)	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	10 lembaga		Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	10 lembaga	19,999,890	
4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja	46,35%	114,586,952	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja	46,35%	404,646,462	
11	Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan	46,35%	27,448,390	Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan	46,35%	27,448,390	

Rencana Kerja Tahun 2023

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31)	Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja		Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	20 orang	27,448,390	Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja		Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	20 orang	27,448,390	
12	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Persentase Penyebarluasan Informasi Kerja	80%	87,138,562	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Persentase Penyebarluasan Informasi Kerja	80%	172,138,972	
32)	Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online		Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 dokumen		Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online		Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 dokumen	15,000,000	
33)	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online		Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	250 orang	87,138,562	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online		Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	250 orang	87,138,562	
34)	Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	30 orang		Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	30 orang	70,000,410	
13	Kegiatan Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase PMI yang Dilindungi	80%	-	Kegiatan Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase PMI yang Dilindungi	80%	205,059,100	

Rencana Kerja Tahun 2023

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35)	Sub Kegiatan Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)		Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	20 orang		Sub Kegiatan Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)		Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	20 orang	102,845,700	
36)	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran		Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	10 orang		Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran		Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	10 orang	27,213,400	
37)	Sub Kegiatan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan		Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	16 orang		Sub Kegiatan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan		Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	16 orang	75,000,000	
5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	4,03%	27,617,800	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	4,03%	27,617,800	

Rencana Kerja Tahun 2023

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di daerah Kabupaten/Kota		Persentase Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	75%	27,617,800	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di daerah Kabupaten/Kota		Persentase Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	75%	27,617,800	
38)	Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perselisihan yang Dicegah	7 Perkara	23,538,400	Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perselisihan yang Dicegah	7 Perkara	23,538,400	
39)	Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	3 Perkara	4,079,400	Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	3 Perkara	4,079,400	
B	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				1,424,721,555	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				1,925,219,165	

Rencana Kerja Tahun 2023

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Persentase Industri yang Menerapkan Teknologi Tepat Guna	0,10%	1,165,491,785	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Persentase Industri yang Menerapkan Teknologi Tepat Guna	0,10%	1,374,851,785	
			Persentase Sentra/Klaster Industri yang Tertata	20%				Persentase Sentra/Klaster Industri yang Tertata	20%		
15	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Persentase Capaian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	66,67%	1,165,491,785	Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Persentase Capaian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	66,67%	1,374,851,785	
40)	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 dokumen	174,972,430	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 dokumen	274,972,430	
41)	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 dokumen	339,723,509	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 dokumen	339,723,509	

Rencana Kerja Tahun 2023

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42)	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 dokumen	31,108,415	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 dokumen	31,108,415	
43)	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 dokumen	477,654,175	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 dokumen	537,014,175	
44)	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 dokumen	142,033,256	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 dokumen	142,033,256	
45)	Sub Kegiatan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (UPTD P3R)		Jumlah Dokumen Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (UPTD P3R)	1 dok		Sub Kegiatan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (UPTD P3R)		Jumlah Dokumen Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (UPTD P3R)	1 dok	50,000,000	

Rencana Kerja Tahun 2023

No	Rancangan Awal RKPd Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		Persentase Industri yang Menerapkan Standarisasi Mutu Produk	2,40%	259,229,770	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		Persentase Industri yang Menerapkan Standarisasi Mutu Produk	2,40%	50,229,770	
16	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)		Jumlah Pelaku Usaha Industri yang Difasilitasi	6 IKM	259,229,770	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)		Jumlah Pelaku Industri yang Difasilitasi	6 IKM	50,229,770	
46)	Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi Melalui SIINAS yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	1 dokumen	259,229,770	Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi Melalui SIINAS yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	1 dokumen	25,229,770	

Rencana Kerja Tahun 2023

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47)	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	25,000,000	
8	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Jumlah Data Perusahaan IKM yang Masuk SIINas	1 IKM	-	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Jumlah Data Perusahaan IKM yang Masuk SIINas	1 IKM	500,137,610	
17	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase Penyediaan Informasi Industri	33,33%	-	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase Penyediaan Informasi Industri	33,33%	500,137,610	

Rencana Kerja Tahun 2023

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48)	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasioanl (SIINAS)		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasioanl (SIINAS)	1 dokumen		Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasioanl (SIINAS)		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasioanl (SIINAS)	1 dokumen	64,137,610	
49)	Sub Kegiatan Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINAS	1 dokumen		Sub Kegiatan Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINAS	1 dokumen	401,000,000	
50)	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas		Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINAS	1 dokumen		Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas		Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINAS	1 dokumen	35,000,000	
TOTAL					5,270,869,042	TOTAL					6,639,886,272

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dalam mendukung arah kebijakan telah menetapkan rencana program utama untuk program lima tahun ke depan.

Adapun usulan program dan kegiatan di usulkan dalam Rencana Kerja (Renja) 2023 adalah dengan memperhatikan dan menindaklanjuti arah dan kebijakan pembangunan Tujuan dan Sasaran Walikota Payakumbuh khususnya dibidang ketenagakerjaan dan perindustrian dari Rencana Pembangunan Jangka Daerah (RPD) Tahun 2023-2026, selanjutnya Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh membuat Rencana Strategis (Renstra) untuk mendukung Tujuan dan Sasaran Walikota Payakumbuh dimaksud dan dilanjutkan dengan penyusunan Rencana Kerja ini dengan tidak lupa memperhatikan pemangku kepentingan baik dari masyarakat yang terkait langsung maupun dari Pemerintah.

Dengan pertimbangan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan memperhatikan hasil Musrenbang mulai dari Tingkat Kelurahan, Tingkat Kecamatan yang ditindak lanjuti dengan Tingkat Kota, responsive terhadap permasalahan serta isu-isu strategis, efisien dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan.

Dengan demikian rencana kerja ini tidak hanya memenuhi OPD saja melainkan juga dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan Tenaga Kerja dan Perindustrian, sepanjang anggaran mampu terakomodir dalam memenuhi sesuai program dan kegiatan.

Usulan-usulan yang disampaikan oleh masyarakat baik itu melalui Musrenbang maupun pokok pikiran DPRD yang berhubungan dengan Tupoksi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh akan terus di akomodir baik melalui pendanaan Kota maupun pengusulan pendanaan Provinsi maupun Pusat seperti dapat dilihat pada tabel II.4a dan II.4b.

Tabel II.4a

**PERSANDINGAN DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS HASIL MUSRENBANG KECAMATAN PAYAKUMBUH TAHUN 2022
DENGAN RANCANGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
PER KECAMATAN**

PERANGKAT DAERAH : DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

No	Hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2022				Kegiatan Sesuai Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		
	Kegiatan Prioritas	Lokasi (Kelurahan)	Indikator Kinerja	Volume	Kegiatan / Sub Kegiatan Rancangan Renja Tahun 2023	Pagu Indikatif Tahun 2023	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kecamatan Payakumbuh Barat						
1	Pelatihan Menjahit	Pakan Senayan	Untuk menambah pengetahuan dan keterampilan ibu-ibu PKK				Tolak, karena keterbatasan anggaran untuk kegiatan pelatihan ini
2	Pelatihan Memasak Aneka Kue	Pakan Senayan	Untuk menambah pengetahuan dan keterampilan ibu-ibu PKK		Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	75,000,000	Diterima, dengan menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia Tahun 2023

No	Hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2022				Kegiatan Sesuai Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		
	Kegiatan Prioritas	Lokasi (Kelurahan)	Indikator Kinerja	Volume	Kegiatan / Sub Kegiatan Rancangan Renja Tahun 2023	Pagu Indikatif Tahun 2023	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Pelatihan Memasak Aneka Kue	Parak Batuang	Kurangnya keahlian warga kelurahan parak batuang		Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	75,000,000	Diterima, dengan menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia Tahun 2023
4	Pelatihan Menjahit	Parak Batuang	Kurangnya keahlian warga kelurahan parak batuang				Tolak, karena keterbatasan anggaran untuk kegiatan pelatihan ini
5	Pelatihan Memasak Aneka Kue	Padang Tinggi Piliang	Tingginya minat ibu-ibu dan pemuda untuk belajar dan berusaha dalam bidang memasak kue		Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	75,000,000	Diterima, dengan menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia Tahun 2023
	Kecamatan Latina						

No	Hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2022				Kegiatan Sesuai Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		
	Kegiatan Prioritas	Lokasi (Kelurahan)	Indikator Kinerja	Volume	Kegiatan / Sub Kegiatan Rancangan Renja Tahun 2023	Pagu Indikatif Tahun 2023	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Pelatihan Menjahit	Parambahan	Untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan juga kreatifitas dalam menghadapi tantangan ekonomi				Tolak, karena keterbatasan anggaran untuk kegiatan pelatihan ini
7	Pelatihan Menjahit	Padang Sikabu	Meningkatkan keahlian serta perekonomian warga	25 orang			Tolak, karena keterbatasan anggaran untuk kegiatan pelatihan ini
8	Pelatihan Memasak Aneka Kue	Parit Muko Aia	Meningkatkan keterampilan ibu/remaja perempuan dalam mengolah makanan sehat	30 orang	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	75,000,000	Diterima, dengan menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia Tahun 2023
	Kecamatan Payakumbuh Utara						
9	Pelatihan Menjahit	Napar	Saat ini banyak warga yang membutuhkan keterampilan menjahit	15 orang			Tolak, karena keterbatasan anggaran untuk kegiatan pelatihan ini

Rencana Kerja Tahun 2023

No	Hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2022				Kegiatan Sesuai Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		
	Kegiatan Prioritas	Lokasi (Kelurahan)	Indikator Kinerja	Volume	Kegiatan / Sub Kegiatan Rancangan Renja Tahun 2023	Pagu Indikatif Tahun 2023	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kecamatan Payakumbuh Selatan						
10	Pelatihan Otomotif Kendaraan Roda 2	Kapalo Koto Ampangan	Perlunya peningkatan keterampilan bagi warga untuk mengurangi pengangguran				Tolak, karena keterbatasan anggaran untuk kegiatan pelatihan ini
11	Pelatihan Menjahit	Padang Karambia	Meningkatkan keterampilan pengurus PKK/remaja putri yang putus sekolah	30 orang			Tolak, karena keterbatasan anggaran untuk kegiatan pelatihan ini
12	Pelatihan Menjahit	Limbukan	Peningkatan kemampuan masyarakat dalam menjahit dan peningkatan ekonomi	15 orang			Tolak, karena keterbatasan anggaran untuk kegiatan pelatihan ini
13	Pelatihan Memasak Aneka Kue	Limbukan	Peningkatan sumber daya manusia dan perekonomian masyarakat	15 orang	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	75,000,000	Diterima, dengan menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia Tahun 2023

No	Hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2022				Kegiatan Sesuai Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		
	Kegiatan Prioritas	Lokasi (Kelurahan)	Indikator Kinerja	Volume	Kegiatan / Sub Kegiatan Rancangan Renja Tahun 2023	Pagu Indikatif Tahun 2023	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8
14	Pelatihan Menjahit	Koto Tuo Limo Kampuang	Masih banyaknya ibu-ibu dan pemuda, pemudi yang pengangguran dan tidak memiliki keterampilan				Tolak, karena keterbatasan anggaran untuk kegiatan pelatihan ini
15	Pelatihan Komputer	Koto Tuo Limo Kampuang	Masih banyaknya pemuda pemudi yang menganggur yang tidak mempunyai keterampilan komputer, sekarang komputer diperlukan untuk pekerjaan sehari-hari				Tolak, karena keterbatasan anggaran untuk kegiatan pelatihan ini
	Kecamatan Payakumbuh Timur						
16	Pelatihan Menjahit	Padang Tengah Payobadar	Pelatihan ibu-ibu rumah tangga				Tolak, karena keterbatasan anggaran untuk kegiatan pelatihan ini
17	Pelatihan Menjahit	Payobasung	Peningkatan keterampilan dan mengurangi angka pengangguran				Tolak, karena keterbatasan anggaran untuk kegiatan pelatihan ini
18	Pelatihan Menjahit	Koto Panjang	Peningkatan keterampilan dan mengurangi angka pengangguran	30 orang			Tolak, karena keterbatasan anggaran untuk kegiatan pelatihan ini

No	Hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2022				Kegiatan Sesuai Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		
	Kegiatan Prioritas	Lokasi (Kelurahan)	Indikator Kinerja	Volume	Kegiatan / Sub Kegiatan Rancangan Renja Tahun 2023	Pagu Indikatif Tahun 2023	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8
19	Pelatihan Memasak Aneka Kue	Koto Panjang	Peningkatan keterampilan dan mengurangi angka pengangguran	15 orang	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	75,000,000	Diterima, dengan menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia Tahun 2023
20	Pelatihan Memasak Aneka Kue	Padang Alai Bodi	Masih kurang keterampilan membuat kue		Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	75,000,000	Diterima, dengan menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia Tahun 2023
21	Pelatihan Menjahit	Sicincin	Masyarakat butuh pelatihan menjahit				Tolak, karena keterbatasan anggaran untuk kegiatan pelatihan ini

Tabel II.4aa
PERSANDINGAN DAFTAR KEGIATAN DAN E-POKIR
DENGAN RANCANGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH : DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

No	E-POKIR				Kegiatan Sesuai Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		
	Kegiatan Prioritas	Pengusul dan Lokasi (Kelurahan)	Indikator Kinerja	Volume	Kegiatan / Sub Kegiatan Rancangan Renja Tahun 2023	Pagu Indikatif Tahun 2023	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pelatihan Memasak Aneka Kue	H. SUPARMAN, S.Pd		50 orang (Rp. 20.000.000,-)	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	75,000,000	Diterima, dengan menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia Tahun 2023
2	Pelatihan Menjahit	ISMET HARIUS, S.Sos		20 orang			Diterima, dengan menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia Tahun 2023
3	Pelatihan Rajut	YERNITA		50 orang (Rp. 10.000.000,-)			Diterima, dengan menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia Tahun 2023
4	Pelatihan Rajut	MAWI ETEK HARIANTO		15 orang (Rp. 180.000.000,-)			Diterima, dengan menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia Tahun 2023

Tabel II.4b
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2023
KOTA PAYAKUMBUH

PERANGKAT DAERAH : DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
A	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja				
1	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi				
a	Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Kota Payakumbuh	Jumlah peserta pelatihan memasak aneka kue	50 orang / Rp. 20.000.000,-	
b	Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Kota Payakumbuh	Jumlah peserta pelatihan menjahit	20 orang	
B	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri				
1	Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
a	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kota Payakumbuh	Jumlah peserta pelatihan rajut	50 orang / Rp. 10.000.000,-	
b	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kota Payakumbuh	Jumlah peserta pelatihan rajut	15 orang / Rp. 180.000.000,-	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh yang berpijak pada Kebijakan Nasional dalam melaksanakan program dan kegiatan merupakan satu kesatuan dalam membantu tercapainya Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dimana semua program dan kegiatan yang dilaksanakan diharapkan sepenuhnya bisa mendukung program pemerintah pusat.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh merupakan tahapan dalam perumusan perencanaan dan penganggaran dan merupakan integrasi antara sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis lokal, Nasional dan Global serta tetap dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Renstra. Renstra Strategi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian secara substansi tidak berdiri sendiri, dokumen ini terkait dengan keberadaan dokumen perencanaan lainnya yang bersifat perencanaan program pembangunan. Oleh karena itu dalam penyusunannya memperhatikan dan mensinergikan dengan :

1. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025;
2. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 04 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026;
3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2020-2024.
5. Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024.

Serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan Urusan Ketenagakerjaan dan Perindustrian.

Rencana Strategis merupakan acuan untuk penyusunan Rencana Kerja setiap tahun dalam rangka pencapaian tujuan, sasaran dan arah pembangunan jangka menengah daerah Kota Payakumbuh.

3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA OPD

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam memenuhi tujuan dan sasarannya untuk kurun waktu satu tahun kedepan dengan diformulasikannya tujuan ini dalam mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, lebih dari itu perumusan tujuan ini juga akan memungkinkan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh untuk mengukur sejauh mana tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Rumusan tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;
2. Meningkatnya produktifitas sector industri;
3. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintah.

Tujuan ini mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Tujuan dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh adalah menerapkan prinsip Good Governance dilingkungan Instansi Pemerintah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka peningkatan pelayanan yang mendasar harus diperbaiki, agar dapat mewujudkan peningkatan pelayanan dan menumbuhkan sikap akuntabel, maka harus ditunjang dengan system administrasi dan pemerintahan yang baik, sarana dan prasarana yang cukup, wawasan serta pengetahuan aparat yang luas serta regulasi peraturan yang mampu mempercepat pembangunan. Pada akhirnya keseluruhan tujuan dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh pada satu tahun ke depan dapat tercapai.

Adapun sasaran yang ingin dicapai Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya serapan tenaga kerja;
2. Meningkatnya produksi industri pengolahan;
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

- a. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan

Dalam penyusunan rencana kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2023 dalam rangka mencapai tujuan pembangunan ekonomi masyarakat, sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya telah mempertimbangkan beberapa hal diantaranya :

Pencapaian Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah periode 2023-2026

Program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh yang tertuang di dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 sangat memperhatikan program pengentasan kemiskinan, hal ini dapat dilihat pada rencana kegiatan meningkatkan SDM angkatan kerja dan keterampilan angkatan kerja dengan melalui pelatihan dan pendidikan tenaga kerja, memfasilitasi penempatan tenaga kerja di dalam dan luar negeri.

Pendayagunaan potensi ekonomi daerah. Potensi ekonomi Kota Payakumbuh yang sebagian besar masyarakatnya bergerak dibidang IKM sangat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat, dimana IKM ini perkembangannya stabil tidak dipengaruhi oleh dampak globalisasi.

- b. Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2023 terdiri dari 7 Program, 14 Kegiatan dan 34 Sub kegiatan yang sebagian besar terfokus kepada menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran dan meningkatnya sektor strategis yang didukung oleh Kebijakan yang terukur dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Tenaga Kerja dan IKM dengan total kebutuhan dananya sebesar Rp. 5.270.869.042,- (Lima milyar dua ratus tujuh puluh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu empat puluh dua rupiah).

Untuk Tahun 2023 Dinas Tenaga kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh mengusulkan program sesuai dengan prioritas pembangunan daerah Tahun 2023 yang sumber dana berasal dari dana APBD dapat dilihat pada tabel III.1.

Tabel III.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
KOTA PAYAKUMBUH

PERANGKAT DAERAH : DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

No	Urusan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana *)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	URUSAN PEMERINTAHAN TENAGA KERJA				3,846,147,487				3,592,751,542
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	90.00	3,460,738,295			91.00	3,362,423,234
		Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat		A				A	
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program/Kegiatan		80%	96,446,010			80%	96,446,010
1)	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4 dokumen	11,469,330	DAU		4 dokumen	11,469,330

Rencana Kerja Tahun 2023

No	Urusan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana *)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2)	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		3 laporan	14,540,680	DAU		3 laporan	14,540,680
3)	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		11 laporan	70,436,000	DAU		11 laporan	70,436,000
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan Terhadap Aliran Kas		80%	2,718,577,772			80%	2,716,577,772
4)	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		26 orang	2,454,327,772	DAU		26 orang	2,452,327,772
5)	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 dok	264,250,000	DAU		1 dok	264,250,000
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN Berpakaian Dinas dengan Atribut Lengkap		100%	11,157,720			100%	11,157,720
6)	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		21 paket	11,157,720	DAU		21 paket	11,157,720
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana Penunjang Operasional Kantor		80%	251,794,373			80%	184,479,312

Rencana Kerja Tahun 2023

No	Urusan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana *)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7)	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		6 paket	2,004,910	DAU		6 paket	2,205,401
8)	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				DAU		13 paket	1,000,000
9)	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		10 paket	12,000,000	DAU		10 paket	1,000,000
10)	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		85 paket	48,724,140	DAU		85 paket	48,724,140
11)	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		9 paket	20,863,310	DAU		9 paket	20,863,310
12)	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		2 dokumen	6,004,560	DAU		2 dokumen	6,004,560
13)	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		10 laporan	10,500,000	DAU		10 laporan	10,500,000
14)	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		25 laporan	151,697,453	DAU		15 laporan	93,181,901
15)	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1 dokumen		DAU		1 dokumen	1,000,000

Rencana Kerja Tahun 2023

No	Urusan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana *)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ASN Yang Memakai Barang Milik Daerah		100%	33,000,000			100%	4,000,000
16)	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		7 unit		DAU		7 unit	1,000,000
17)	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan		1 unit		DAU		1 unit	1,000,000
18)	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		3 unit	33,000,000	DAU		3 unit	1,000,000
19)	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Disediakan				DAU		1 unit	1,000,000
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor		80%	239,471,180			80%	239,471,180
20)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 laporan	2,210,000	DAU		1 laporan	2,210,000
21)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 laporan	120,000,000	DAU		1 laporan	120,000,000
22)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1 laporan	117,261,180	DAU		1 laporan	117,261,180

Rencana Kerja Tahun 2023

No	Urusan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana *)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional dan Sarana Prasarana Kantor yang Dibayarkan		80%	110,291,240			80%	110,291,240
23)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 unit	39,190,000	DAU		1 unit	39,190,000
24)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		12 unit	59,400,000	DAU		12 unit	59,400,000
25)	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		48 unit	5,638,600	DAU		48 unit	5,638,600
26)	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		17 unit	6,062,640	DAU		17 unit	6,062,640
2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang Tersusun		0,8%	59,994,290			0,81%	2,000,000
8	Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RKT)	Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang Tersusun		0,8%	59,994,290			0,81%	2,000,000
27)	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Makro		1 dok	49,954,370	DAU		1 dok	

Rencana Kerja Tahun 2023

No	Urusan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana *)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28)	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro		1 perusahaan	10,039,920	DAU		1 perusahaan	2,000,000
3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi		3,92%	183,210,150			3,95%	87,123,556
9	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi		80%	183,210,150			80%	86,123,556
29)	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n		20 orang	183,210,150	DAU		16 orang	86,123,556
10	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina		70%	-			70%	1,000,000
30)	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina						10 lembaga	1,000,000
4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja		46,35%	114,586,952			46,45%	119,586,952
11	Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencari Kerja yang Teraftar yang Ditempatkan		46,35%	27,448,390			46,45%	27,448,390

Rencana Kerja Tahun 2023

No	Urusan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana *)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31)	Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja		20 orang	27,448,390	DAU		20 orang	27,448,390
12	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Penyebarluasan Informasi Kerja		80%	87,138,562			80%	89,138,562
32)	Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online				DAU		1 dokumen	1,000,000
33)	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)		250 orang	87,138,562	DAU		250 orang	87,138,562
34)	Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja		30 orang		DAU		30 orang	1,000,000
13	Kegiatan Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMI yang Dilindungi		80%	-			80%	3,000,000
35)	Sub Kegiatan Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya		20 orang				20 orang	1,000,000

Rencana Kerja Tahun 2023

No	Urusan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana *)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36)	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani		10 orang				10 orang	1,000,000
37)	Sub Kegiatan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan		16 orang				16 orang	1,000,000
5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)		4,03%	27,617,800			4,03%	21,617,800
14	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama		75%	27,617,800			75%	21,617,800
38)	Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah		7 Perkara	23,538,400	DAU		7 Perkara	17,538,400
39)	Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan		3 Perkara	4,079,400	DAU		3 Perkara	4,079,400

Rencana Kerja Tahun 2023

No	Urusan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana *)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	URUSAN PEMERINTAHAN PERINDUSTRIAN				1,424,721,555				718,568,616
6	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Industri Yang Menerapkan Teknologi Tepat Guna		0,10%	1,165,491,785			0,10%	689,338,846
		Persentase Sentra/Klaster Yang Tertata		20.00%				20.00%	
15	Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri		66,67%	1,165,491,785			66,67%	689,338,846
40)	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri		1 dokumen	174,972,430	DAU		1 dokumen	
41)	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		1 dokumen	339,723,509	DAU		1 dokumen	1,000,000
42)	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		1 dokumen	31,108,415	DAU		1 dokumen	30,108,415

Rencana Kerja Tahun 2023

No	Urusan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana *)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43)	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		1 dokumen	477,654,175	DAU		1 dokumen	515,197,175
44)	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		1 dokumen	142,033,256	DAU		1 dokumen	142,033,256
45)	Sub Kegiatan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (UPTD P3R)	Jumlah Dokumen Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (UPTD P3R)		1 dok		DAU	-	1 dok	1,000,000
7	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Industri Yang Menerapkan Standarisasi Mutu Produk		2,40%	259,229,770			2,50%	26,229,770
16	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah pelaku industri yang difasilitasi		6 IKM	259,229,770		-	6 IKM	26,229,770

Rencana Kerja Tahun 2023

No	Urusan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana *)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46)	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS		1 dokumen	259,229,770	DAU		1 dokumen	25,229,770
47)	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota		1 dokumen				1 dokumen	1,000,000
8	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah Data Perusahaan IKM yang Masuk SIINas		1 IKM	-		-	1 IKM	3,000,000
17	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Informasi Industri		33,33%	-			33,33%	3,000,000

Rencana Kerja Tahun 2023

No	Urusan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana *)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48)	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)		1 dokumen		DAU		1 dokumen	1,000,000
49)	Sub Kegiatan Diseminasi Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINAS	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINAS		1 dokumen		DAU		1 dokumen	1,000,000
50)	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINAS	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINAS		1 dokumen		DAU		1 dokumen	1,000,000
TOTAL					5,270,869,042				4,311,320,158

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penyusunan program pembangunan bidang ketenagakerjaan dan perindustrian akan terus berlanjut dan di prioritaskan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 dan rencana program kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Perencanaan Tenaga Kerja
3. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
4. Program Penempatan Tenaga Kerja
5. Program Hubungan Industrial
6. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
7. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
8. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Untuk Tahun 2023 Dinas Tenaga kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh mengusulkan program kegiatan sesuai dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 yang sumber dana berasal dari dana APBD dapat dilihat pada tabel IV.1.

Tabel IV.1

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH DENGAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

2.07.3.31.0.00.02.00 - DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						DANA INDIKATIF TAHUN 23 (Rp.)	PERKIRAAN MAJU TAHUN 2024 (Rp.)	JENIS KEGIATAN	PENANGGUNGJAWAB
				IKU (OPD)		INDIKATOR KEGIATAN (OUTCOME)/INDIKATOR SUB KEGIATAN (OUTPUT)		INDKATOR PROGRAM					
				TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Persentase Peningkatan Nilai Produksi	- 93,75% - 3%			Nilai Evaluasi AKIP Disnakerind oleh Inspektorat Nilai IKM Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	A Kategori 90 Indeks	3,460,738,295	3,357,423,234		DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
0.00.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Persentase Capaian Kinerja Program/Kegiatan	80%			96,446,010	96,446,010	Baru	
0.00.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen			11,469,330	11,469,330	Baru	
0.00.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan			14,540,680	14,540,680	Baru	

Rencana Kerja Tahun 2023

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						DANA INDIKATIF TAHUN 23 (Rp.)	PERKIRAAN MAJU TAHUN 2024 (Rp.)	JENIS KEGIATAN	PENANGGUNGJAWAB
				IKU (OPD)		INDIKATOR KEGIATAN (OUTCOME)/INDIKATOR SUB KEGIATAN (OUTPUT)		INDKATOR PROGRAM					
				TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0.00.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 laporan			70,436,000	70,436,000	Baru	
0.00.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Persentase Realisasi Keuangan Terhadap Aliran Kas	80%			2,718,577,772	2,716,577,772	Baru	
0.00.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 orang/bulan			2,454,327,772	2,452,327,772	Baru	
0.00.01.2.02.02	Sub Kegiatan Penyedian Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Hasil Penyedian Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen			264,250,000	264,250,000	Baru	
0.00.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Persentase ASN Berpakaian Dinas dengan Atribut Lengkap	100%			11,157,720	11,157,720	Baru	
0.00.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	21 paket			11,157,720	11,157,720	Baru	
0.00.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah					Persentase Ketersediaan Sarana Penunjang Operasional Kantor	80%			251,794,373	182,479,312	Baru	
0.00.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 paket			2,004,910	2,205,401	Baru	

Rencana Kerja Tahun 2023

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						DANA INDIKATIF TAHUN 23 (Rp.)	PERKIRAAN MAJU TAHUN 2024 (Rp.)	JENIS KEGIATAN	PENANGGUNGJAWAB
				IKU (OPD)		INDIKATOR KEGIATAN (OUTCOME)/INDIKATOR SUB KEGIATAN (OUTPUT)		INDKATOR PROGRAM					
				TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0.00.01.2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 paket			12,000,000	1,000,000	Baru	
0.00.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	85 paket			48,724,140	48,724,140	Baru	
0.00.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 paket			20,863,310	20,863,310	Baru	
0.00.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 dokumen			6,004,560	6,004,560	Baru	
0.00.01.2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu		Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	10 laporan			10,500,000	10,500,000	Baru	
0.00.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 laporan			151,697,453	93,181,901	Baru	
0.00.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Persentase ASN Yang Memakai Barang Milik Daerah	100%			33,000,000	1,000,000	Baru	

Rencana Kerja Tahun 2023

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						DANA INDIKATIF TAHUN 23 (Rp.)	PERKIRAAN MAJU TAHUN 2024 (Rp.)	JENIS KEGIATAN	PENANGGUNGJAWAB
				IKU (OPD)		INDIKATOR KEGIATAN (OUTCOME)/INDIKATOR SUB KEGIATAN (OUTPUT)		INDKATOR PROGRAM					
				TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0.00.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit			33,000,000	1,000,000	Baru	
0.00.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Persentase Ketersedian Jasa Penunjang Operasional Kantor	80%			239,471,180	239,471,180	Baru	
0.00.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan			2,210,000	2,210,000	Baru	
0.00.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan			120,000,000	120,000,000	Baru	
0.00.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan			117,261,180	117,261,180	Baru	
0.00.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Persentase Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional dan Sarana Prasarana Kantor yang Dibayarkan	80%			110,291,240	110,291,240	Baru	
0.00.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit			39,190,000	39,190,000	Baru	

Rencana Kerja Tahun 2023

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						DANA INDIKATIF TAHUN 23 (Rp.)	PERKIRAAN MAJU TAHUN 2024 (Rp.)	JENIS KEGIATAN	PENANGGUNGJAWAB
				IKU (OPD)		INDIKATOR KEGIATAN (OUTCOME)/INDIKATOR SUB KEGIATAN (OUTPUT)		INDKATOR PROGRAM					
				TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0.00.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 unit			59,400,000	59,400,000	Baru	
0.00.01.2.09.05	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel		Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Mebel yang Dipelihara	48 unit			5,638,600	5,638,600	Baru	
0.00.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 unit			6,062,640	6,062,640	Baru	
2.2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	93,75%			Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang Tersusun	0,8%	59,994,290	2,000,000		DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
2.2.07.02.2.01	Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RKT)					Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang Tersusun	0,8%			59,994,290	2,000,000	Baru	
2.2.07.02.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro		Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Rencana Kerja Makro	1 dok			49,954,370	-	Baru	
2.2.07.02.2.01.02	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro		Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	1 perusahaan			10,039,920	2,000,000	Baru	
2.2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	93,75%			Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	3,92%	183,210,150	86,123,556	Baru	

Rencana Kerja Tahun 2023

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						DANA INDIKATIF TAHUN 23 (Rp.)	PERKIRAAN MAJU TAHUN 2024 (Rp.)	JENIS KEGIATAN	PENANGGUNGJAWAB
				IKU (OPD)		INDIKATOR KEGIATAN (OUTCOME)/INDIKATOR SUB KEGIATAN (OUTPUT)		INDKATOR PROGRAM					
				TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.2.07.03.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi					Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	80%			183,210,150	86,123,556	Baru	
2.2.07.03.2.01.01	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi		Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	20 org			183,210,150	86,123,556	Baru	
2.2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	93,75%			Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	46,35%	114,586,952	114,586,952	Baru	
2.2.07.04.2.01	Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota					Persentase Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan	46,35%			27,448,390	27,448,390	Baru	
2.2.07.04.2.01.05	Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja		Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	20 org			27,448,390	27,448,390	Baru	
2.2.07.04.2.03	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja					Persentase Penyebarluasan Informasi Kerja	80%			87,138,562	89,138,562	Baru	

Rencana Kerja Tahun 2023

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						DANA INDIKATIF TAHUN 23 (Rp.)	PERKIRAAN MAJU TAHUN 2024 (Rp.)	JENIS KEGIATAN	PENANGGUNGJAWAB
				IKU (OPD)		INDIKATOR KEGIATAN (OUTCOME)/INDIKATOR SUB KEGIATAN (OUTPUT)		INDKATOR PROGRAM					
				TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.2.07.04.2.03.02	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online		Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	250 orang			87,138,562	87,138,562	Baru	
2.2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	93,75%			Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	4,03%	27,617,800	21,617,800	Baru	
2.2.07.05.2.02	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di daerah Kabupaten/Kota					Persentase Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	75%			27,617,800	21,617,800	Baru	
2.2.07.05.2.02.01	Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Perselisihan yang Dicegah	7 Perkara			23,538,400	17,538,400	Baru	
2.2.07.05.2.02.02	Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	3 Perkara			4,079,400	4,079,400	Baru	
3.3.32.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			Persentase Peningkatan Nilai Produksi	3.00%			Persentase Industri Yang Menerapkan Teknologi Tepat Guna Persentase sentra/Klaster Yang Tertata	0,10% 20%	687,837,610	173,141,671		DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

Rencana Kerja Tahun 2023

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						DANA INDIKATIF TAHUN 23 (Rp.)	PERKIRAAN MAJU TAHUN 2024 (Rp.)	JENIS KEGIATAN	PENANGGUNGJAWAB
				IKU (OPD)		INDIKATOR KEGIATAN (OUTCOME)/INDIKATOR SUB KEGIATAN (OUTPUT)		INDKATOR PROGRAM					
				TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.3.32.02.2.01	Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota					Persentase Capaian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	66,67%			687,837,610	173,141,671	Baru	
3.3.32.02.2.01	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 dokumen			174,972,430	-	Baru	
3.3.32.02.2.02	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 dokumen			339,723,509	1,000,000	Baru	
3.3.32.02.2.03	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 dokumen			31,108,415	30,108,415	Baru	
3.3.32.02.2.05	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 dokumen			142,033,256	142,033,256	Baru	
3.3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI			Persentase Peningkatan Nilai Produksi	3.00%			Persentase Industri yang Menerapkan Standarisasi Mutu Produk	2,40%	259,229,770	25,229,770		DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

Rencana Kerja Tahun 2023

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						DANA INDIKATIF TAHUN 23 (Rp.)	PERKIRAAN MAJU TAHUN 2024 (Rp.)	JENIS KEGIATAN	PENANGGUNGJAWAB
				IKU (OPD)		INDIKATOR KEGIATAN (OUTCOME)/INDIKATOR SUB KEGIATAN (OUTPUT)		INDKATOR PROGRAM					
				TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.3.31.03.2.01	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)					Jumlah Pelaku Usaha Industri yang Difasilitasi	6 IKM			259,229,770	25,229,770	Baru	
3.3.31.03.2.01.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan (IUI), IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota, Dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)		Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	1 dokumen			259,229,770	25,229,770	Baru	
3.3.32.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			Persentase Peningkatan Nilai Produksi	3.00%			Persentase Industri Yang Menerapkan Teknologi Tepat Guna	0,10% 20%	477,654,175	515,197,175		UPTD SENTRA RENDANG
3.3.32.02.2.01	Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota					Persentase Capaian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	66,67%			477,654,175	515,197,175	Baru	

Rencana Kerja Tahun 2023

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						DANA INDIKATIF TAHUN 23 (Rp.)	PERKIRAAN MAJU TAHUN 2024 (Rp.)	JENIS KEGIATAN	PENANGGUNGJAWAB
				IKU (OPD)		INDIKATOR KEGIATAN (OUTCOME)/INDIKATOR SUB KEGIATAN (OUTPUT)		INDKATOR PROGRAM					
				TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.3.32.02.2.04	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 dokumen			477,654,175	515,197,175	Baru	
TOTAL										5,270,869,042	4,295,320,158		

Disamping itu Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh mengajukan usulan pembangunan Tahun 2023 yang dibiayai dari dana APBN yang dapat dilihat pada tabel IV.2.

Tabel IV.2
USULAN PROGRAM/KEGIATAN YANG MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL
SUMBER DANA APBN
TAHUN ANGGARAN 2023

PERANGKAT DAERAH : DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

No	Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Out Put (Proyek) K/L	Program K/L	Kegiatan K/L	Target	Usulan Pagu (Rp.)	Lokasi		Ket.
								Provinsi	Kab/Kota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	TENAGA KERJA									
1	Prioritas Nasional pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar	Perluasan cakupan penerima jaminan kesehatan Nasional dan jaminan sosial bidang ketenagakerjaan	Tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Pencari kerja/orang	320,000,000	Sumatera Barat	Payakumbuh	Pelatihan menjahit dan bantuan peralatan mesin jahit dengan peserta 32 orang
2	Prioritas Nasional pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar	Perluasan cakupan penerima jaminan kesehatan Nasional dan jaminan sosial bidang ketenagakerjaan	Tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Pencari kerja/orang	272,000,000	Sumatera Barat	Payakumbuh	Pelatihan membuat kue/roti dan bantuan peralatan membuat kue/roti dengan peserta 32 orang

Rencana Kerja Tahun 2023

No	Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Out Put (Proyek) K/L	Program K/L	Kegiatan K/L	Target	Usulan Pagu (Rp.)	Lokasi		Ket.
								Provinsi	Kab/Kota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Prioritas Nasional pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar	Perluasan cakupan penerima jaminan kesehatan Nasional dan jaminan sosial bidang ketenagakerjaan	Tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Pencari kerja/orang	1,200,000,000	Sumatera Barat	Payakumbuh	Pelatihan kompetensi : otomotif, las prosesing dan busana dengan peserta 64 orang (4 angkatan)
4	Prioritas Nasional pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar	Perluasan cakupan penerima jaminan kesehatan Nasional dan jaminan sosial bidang ketenagakerjaan	Tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Pencari kerja/orang	600,000,000	Sumatera Barat	Payakumbuh	Pelatihan kewirausahaan bagi kelompok usaha masyarakat dengan peserta 32 orang (2angkatan)
5	Kementerian Tenaga Kerja	Peningkatan pelayanan kepada pencari kerja dan pemberi kerja	Meningkatnya pelayanan kepada pencari kerja dalam pembuatan AK 1	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Pencari kerja yang dilayani	275,000,000	Sumatera Barat	Payakumbuh	Operasional pelayanan AK1

Rencana Kerja Tahun 2023

No	Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Out Put (Proyek) K/L	Program K/L	Kegiatan K/L	Target	Usulan Pagu (Rp.)	Lokasi		Ket.
								Provinsi	Kab/Kota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Prioritas Nasional pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar	Perluasan cakupan penerima jaminan kesehatan Nasional dan jaminan sosial bidang ketenagakerjaan	Terlaksananya pameran bursa kerja (Job Fair) oleh perusahaan	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Perusahaan	150,000,000	Sumatera Barat	Payakumbuh	Pameran Bursa Kerja dengan peserta 25 perusahaan
7	Prioritas Nasional pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar	Perluasan cakupan penerima jaminan kesehatan Nasional dan jaminan sosial bidang ketenagakerjaan	Terlaksananya Sosialisasi Undang-Undang Ketenagakerjaan	Program Hubungan Industrial	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Perusahaan	250,000,000	Sumatera Barat	Payakumbuh	Sosialisasi Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan peserta 100 perusahaan
II	PERINDUSTRIAN									
1	Kementerian Perindustrian	Direktorat Jendral Industri Kecil, Menengah dan Aneka	Sentra IKM pangan yang mendapatkan pelatihan manajemen dan teknis produksi, penguatan kelembagaan dan mesin/peralatan	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Sentra	500,000,000	Sumatera Barat	Payakumbuh	Pengadaan peralatan laboratorium (1 paket) dan fasilitasi sertifikasi sentra IKM rendang (1 paket)

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh ini dirumuskan dan disusun sesuai dengan sistematika penulisan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang merupakan petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Secara umum Renja ini memuat arahan Perencanaan Taktis Strategis dalam pelaksanaan pembangunan terhadap berbagai program pemberdayaan dan pengembangan potensi-potensi bidang Tenaga Kerja dan bidang Perindustrian Tahun 2023. Untuk lebih terukurnya hasil-hasil program pembangunan yang akan dilaksanakan, dalam Renja ini dirumuskan beberapa sasaran capaian dengan indikator sasaran yang tepat dan terukur dengan harapan dapat dijadikan pedoman dan arahan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran dinas untuk satu Tahun 2023 khususnya dan lima tahun ke depan secara umum.

Disadari bahwa keberhasilan mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas tersebut tidak semata-mata ditentukan oleh lengkapnya materi arahan yang dimuat dalam Renja ini, akan tetapi sangat tergantung pada tekad, semangat, ketaatan dan disiplin serta pemahaman Aparatur terhadap fungsi pelayanan dan tugas pokok masing-masing. Tidak kalah pentingnya adalah peran aktif dan sikap mental masyarakat dalam mengapresiasi berbagai program pembangunan yang akan dilaksanakan di lingkungan mereka.

Rencana Kerja ini dibuat dan disusun lebih komprehensif dengan mengedepankan logika perencanaan yang berbasis input dari lingkungan sekitar yang dijabarkan dalam berbagai isu-isu strategis dan telaahan terhadap aspek-aspek yang mempengaruhi perencanaan itu sendiri. Dengan adanya Dokumen Renja ini dapat dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam mewujudkan capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh yang berdaya guna dan berhasil guna dalam memberdayakan segala potensi baik itu Tenaga Kerja dan IKM di Kota Payakumbuh.

Payakumbuh, 8 Agustus 2022
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Kota Payakumbuh



[Signature]
YUNIDA FATWA, S.Sos. M.Si
NIP. 19670601 198809 2 001

LAMPIRAN



Tabel IV.1
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH DENGAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

2.07.3.31.0.00.02.00 -DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

No	Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas	Lokasi	Indikasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan						Dana Indikatif Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024	Jenis Kegiatan	Jenis Kegiatan
				IKU (OPD)		Indikator Kegiatan (outcome)/ Indikator Subkegiatan (output)		Indikator Program					
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			- Persentase Penyerapan Tenaga Kerja - Persentase Peningkatan Nilai Produksi	- 93,75% - 3%			Nilai evaluasi AKIP Disnakerind oleh Inspektorat Nilai IKM Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian	A kategori 90 indeks	3.460.738.295,00	3.357.423.234,00		DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
0.00.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Persentase capaian kinerja program/kegiatan	80 %			96.446.010,00	96.446.010,00	Baru	
0.00.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen			11.469.330,00	11.469.330,00	Baru	
0.00.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan			14.540.680,00	14.540.680,00	Baru	
0.00.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Laporan			70.436.000,00	70.436.000,00	Baru	
0.00.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Persentase realisasi keuangan terhadap aliran kas	80 persen			2.718.577.772,00	2.716.577.772,00	Baru	
0.00.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Semua Kab/Kota,			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 orang/bula			2.454.327.772,00	2.452.327.772,00	Baru	



No	Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas	Lokasi	Indikasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan						Dana Indikatif Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024	Jenis Kegiatan	Jenis Kegiatan
				IKU (OPD)		Indikator Kegiatan (outcome)/ Indikator Subkegiatan (output)		Indikator Program					
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				n						
0.00.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen			264.250.000,00	264.250.000,00	Baru	
0.00.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap	100 persen			11.157.720,00	11.157.720,00	Baru	
0.00.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	21 paket			11.157.720,00	11.157.720,00	Baru	
0.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					Persentase ketersediaan sarana penunjang operasional kantor	80 persen			251.794.373,00	184.479.312,00	Baru	
0.00.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 paket			2.004.910,00	2.205.401,00	Baru	
0.00.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket			12.000.000,00	1.000.000,00	Baru	
0.00.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Semua Kab/Kota, Semua			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	85 paket			48.724.140,00	48.724.140,00	Baru	



No	Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas	Lokasi	Indikasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan						Dana Indikatif Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024	Jenis Kegiatan	Jenis Kegiatan
				IKU (OPD)		Indikator Kegiatan (outcome)/ Indikator Subkegiatan (output)		Indikator Program					
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Kecamatan, Semua Kelurahan										
0.00.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	9 paket			20.863.310,00	20.863.310,00	Baru	
0.00.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen			6.004.560,00	6.004.560,00	Baru	
0.00.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 laporan			10.500.000,00	10.500.000,00	Baru	
0.00.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 laporan			151.697.453,00	93.181.901,00	Baru	
0.00.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Persentase ASN Yang Memakai Barang Milik Daerah	100 persen			33.000.000,00	4.000.000,00	Baru	
0.00.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit			33.000.000,00	1.000.000,00	Baru	



No	Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas	Lokasi	Indikasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan						Dana Indikatif Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024	Jenis Kegiatan	Jenis Kegiatan
				IKU (OPD)		Indikator Kegiatan (outcome)/ Indikator Subkegiatan (output)		Indikator Program					
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Kelurahan										
0.00.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Persentase ketersediaan jasa penunjang operasional kantor	80 persen			239.471.180,00	239.471.180,00	Baru	
0.00.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan			2.210.000,00	2.210.000,00	Baru	
0.00.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan			120.000.000,00	120.000.000,00	Baru	
0.00.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan			117.261.180,00	117.261.180,00	Baru	
0.00.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Persentase pemeliharaan kendaraan dinas/operasional dan sarana prasarana kantor yang dibayarkan	80 persen			110.291.240,00	110.291.240,00	Baru	
0.00.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit			39.190.000,00	39.190.000,00	Baru	
0.00.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 unit			59.400.000,00	59.400.000,00	Baru	



No	Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas	Lokasi	Indikasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan						Dana Indikatif Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024	Jenis Kegiatan	Jenis Kegiatan
				IKU (OPD)		Indikator Kegiatan (outcome)/ Indikator Subkegiatan (output)		Indikator Program					
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Semua Kelurahan										
0.00.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Mebel yang Dipelihara	48 unit			5.638.600,00	5.638.600,00	Baru	
0.00.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 unit			6.062.640,00	6.062.640,00	Baru	
2.2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	93.75%			Persentase dokumen rencana tenaga kerja yang tersusun	0,80 %	59.994.290,00	2.000.000,00		DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUS TRIAN
2.2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		-			Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang Tersusun	0.80%			59.994.290,00	2.000.000,00	Baru	
2.2.07.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 dokumen			49.954.370,00	0,00	Baru	
2.2.07.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	1 perusahaa n			10.039.920,00	2.000.000,00	Baru	
2.2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA			Persentase Penyerapan Tenaga	93.75%			Persentase tenaga	3,92 %	183.210.150,00	86.123.556,00		DINAS



No	Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas	Lokasi	Indikasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan						Dana Indikatif Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024	Jenis Kegiatan	Jenis Kegiatan
				IKU (OPD)		Indikator Kegiatan (outcome)/ Indikator Subkegiatan (output)		Indikator Program					
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			Kerja				kerja bersertifikat kompetensi					TENAGA KERJA DAN PERINDUS TRIAN
2.2.07.03.2.0 1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi					Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasi Komptensi	80 persen			183.210.150,00	86.123.556,00	Baru	
2.2.07.03.2.0 1.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun	20 orang			183.210.150,00	86.123.556,00	Baru	
2.2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	93.75%			Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota	46,35 %	114.586.952,00	114.586.952,00		DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUS TRIAN
2.2.07.04.2.0 1	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota		-			Persentase Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan	46.35%			27.448.390,00	27.448.390,00	Baru	
2.2.07.04.2.0 1.05	Perluasan Kesempatan Kerja		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	20 orang			27.448.390,00	27.448.390,00	Baru	
2.2.07.04.2.0 3	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja					Persentase Penyebarluasan Informasi Kerja	80 persen			87.138.562,00	89.138.562,00	Baru	
2.2.07.04.2.0 3.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online		Semua Kab/Kota, Semua			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online	250 Orang			87.138.562,00	87.138.562,00	Baru	



No	Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas	Lokasi	Indikasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan						Dana Indikatif Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024	Jenis Kegiatan	Jenis Kegiatan
				IKU (OPD)		Indikator Kegiatan (outcome)/ Indikator Subkegiatan (output)		Indikator Program					
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Kecamatan, Semua Kelurahan			(Karir Hub)							
2.2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	93.75%			Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	4,03 %	27.617.800,00	21.617.800,00		DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
2.2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota					Persentase Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama	75 persen			27.617.800,00	21.617.800,00	Baru	
2.2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Perselisihan yang Dicegah	7 perkara			23.538.400,00	17.538.400,00	Baru	
2.2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	3 perkara			4.079.400,00	4.079.400,00	Baru	
3.3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			Persentase Peningkatan Nilai Produksi	3%			Persentase industri yang menerapkan teknologi tepat guna Persentase sentra/klaster industri yang tertata	0,10 % 20 %	687.837.610,00	173.141.671,00		DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN



No	Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas	Lokasi	Indikasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan						Dana Indikatif Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024	Jenis Kegiatan	Jenis Kegiatan
				IKU (OPD)		Indikator Kegiatan (outcome)/ Indikator Subkegiatan (output)		Indikator Program					
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.3.31.02.2.0 1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		-			Persentase Capaian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	66.67%			687.837.610,00	173.141.671,00	Baru	
3.3.31.02.2.0 1.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 dokumen			174.972.430,00	0,00	Baru	
3.3.31.02.2.0 1.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 dokumen			339.723.509,00	1.000.000,00	Baru	
3.3.31.02.2.0 1.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 dokumen			31.108.415,00	30.108.415,00	Baru	
3.3.31.02.2.0 1.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 dokumen			142.033.256,00	142.033.256,00	Baru	
3.3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA			Persentase Peningkatan Nilai Produksi	3%			Persentase Industri yang menerapkan standarisasi mutu produk	2,40 %	259.229.770,00	25.229.770,00		DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUS TRIAN
3.3.31.03.2.0 1	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota					Jumlah Pelaku Usaha Industri Yang Difasilitasi	6 IKM			259.229.770,00	26.229.770,00	Baru	



No	Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas	Lokasi	Indikasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan						Dana Indikatif Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024	Jenis Kegiatan	Jenis Kegiatan
				IKU (OPD)		Indikator Kegiatan (outcome)/ Indikator Subkegiatan (output)		Indikator Program					
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.3.31.03.2.0 1.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	1 dokumen			259.229.770,00	25.229.770,00	Baru	
3.3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			Persentase Peningkatan Nilai Produksi	3%			Persentase industri yang menerapkan teknologi tepat guna Persentase sentra/klaster industri yang tertata	0,10 % 20 %	477.654.175,00	515.197.175,00		UPTD SENTRA RENDANG
3.3.31.02.2.0 1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		-			Persentase Capaian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	66.67%			477.654.175,00	516.197.175,00	Baru	
3.3.31.02.2.0 1.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen			477.654.175,00	515.197.175,00	Baru	
Total										5.270.869.042	4.295.320.158		

Payakumbuh, 29 Agustus 2022



No	Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas	Lokasi	Indikasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan						Dana Indikatif Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024	Jenis Kegiatan	Jenis Kegiatan
				IKU (OPD)		Indikator Kegiatan (outcome)/ Indikator Subkegiatan (output)		Indikator Program					
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

NIP.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
1. Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	93,75%
2. Meningkatnya Produksi Industri Pengolahan	Persentase Peningkatan Nilai Produksi	3,00%
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Hasil Penilaian AKIP Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian oleh Inspektorat	A

Payakumbuh, 8 Agustus 2022
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Kota Payakumbuh


YUNIDA FATWA, S.Sos, M.Si
NIP. 19670601 198809 2 001



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

Jln. Gelatik Kel. Tigo Koto Diate Kec. Payakumbuh Utara
Telp/Fax. (0752) 7971800 Email : disnakerprin@gmail.com Website : <https://disnakerin.payakumbuhkota.go.id>

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
GENDER BUDGET STATEMENT

OPD : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh
TAHUN ANGGARAN : 2023

Program	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
Kegiatan	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi
Sub Kegiatan	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
Kode kegiatan	2.07.03.2.01.01 (Sesuai RKA-SKPD)
Analisis Situasi	1. Data Pembuka Wawasan a. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan masalah tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja (Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan), Tenaga kerja dalam pembangunan Nasional merupakan factor dinamika penting yang menentukan laju pertumbuhan perekonomian baik dalam kedudukannya sebagai tenaga kerja produktif maupun sebagai konsumen. Ketidakseimbangan dalam penyebaran penduduk antar daerah atau wilayah mengakibatkan tidak proporsionalnya penggunaan tenaga kerja secara regional dan sektoral sehingga menghambat pula laju pertumbuhan perekonomian Nasional. b. Tujuan pembangunan ekonomi adalah menciptakan pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi, perubahan social, mengurangi atau menghapus kemiskinan, mengurangi ketimpangan dan pengangguran, sejalan dengan hal tersebut, maka pembangunan ekonomi daerah menghendaki adanya kerjasama diantara pemerintah, sector swasta dan masyarakat

	dalam mengelola sumber daya yang dimiliki oleh wilayah tersebut dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja seluas-luasnya. c. Angka proyeksi Tahun 2021 untuk Kota Payakumbuh, jumlah Angkatan Kerja yang bekerja sebanyak 74.303 orang dan jumlah Pengangguran sebanyak 4.805 orang. Hal ini berarti ada kenaikan Pengangguran dan ada penurunan jumlah Angkatan Kerja yang bekerja. Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Payakumbuh Tahun 2021 mengalami penurunan yang sebelumnya Tahun 2020 sebesar 6,68% dan di Tahun 2021 sebesar 6,47%. Hal ini bisa terjadi karena pengaruh perekonomian yang tidak stabil terutama di bidang industri maupun UMKM dan ditambah dengan kondisi pandemi covid 19, sehingga secara tidak langsung berimbas pada perekonomian dan kenaikan jumlah pengangguran. e. Meskipun tingkat pengangguran di Kota Payakumbuh mengalami penurunan dari 6,68% menjadi 6,47%, maka Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh akan tetap menjadi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh. Tingkat pengangguran untuk Tahun 2021 di Kota Payakumbuh berjumlah 4.805 orang. Tingkat pengangguran banyak didominasi oleh laki-laki sebanyak 3.060 orang sedangkan perempuan sebanyak 1.745 orang. f. Menyikapi permasalahan tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh melakukan kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi dengan sub kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan pencari kerja sehingga mampu bersaing di pasar kerja. g. Dengan pelatihan ini tidak membedakan laki-laki maupun perempuan. h. Untuk Tahun 2023 kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
--	--

	Keterampilan Bagi Pencari Kerja dilaksanakan dengan jumlah peserta 16 orang. 2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender a. Faktor Kesenjangan ➤ Dari aspek akses : Belum terbukanya akses perempuan dan laki-laki dalam melakukan kegiatan pelatihan tersebut. ➤ Dari aspek partisipasi : Keterlibatan perempuan sangat tinggi peminat dalam melakukan kegiatan pelatihan tersebut. ➤ Dari aspek control : Tingginya peminat perempuan menyebabkan kontrol mereka terhadap apakah kegiatan itu berjalan dengan baik menjadi sangat terbuka untuk perempuan. ➤ Dari aspek manfaat : Masih kurangnya peminat laki-laki dibandingkan perempuan untuk mengikuti pelatihan menjahit. b. Penyebab Internal ➤ Masih minimnya pahaman konsep Gender oleh peminat (Pencari kerja). ➤ Masih adanya pembatasan antara laki dan perempuan untuk ikut kegiatan pelatihan. ➤ Adanya kesenjangan tingginya tingkat pengangguran laki-laki. ➤ Masih kurangnya peminat laki-laki dibandingkan perempuan untuk mengikuti pelatihan menjahit. c. Penyebab Eksternal ➤ Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang gender bahwa gender adalah mendahulukan perempuan. ➤ Adanya budaya patriarki masih mengutamakan kaum pria dalam hal hal yang seperti menjadi kepala keluarga, kepala desa, ketua kelompok, tokoh masyarakat dll. ➤ Terbatasnya akses dan kapasitas perempuan.
--	---

Rencana Tindak	Kegiatan	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	
		Tujuan	Meningkatnya Keterampilan Para Pencari Kerja
		Aktivitas 1	Pelaksanaan pelatihan menjahit 1. Menyeleksi dan menetapkan peserta pelatihan membuat aneka kue/roti dari peserta yang mendaftar 2. Menyelenggarakan pelatihan membuat aneka kue/roti 3. Membuat laporan kegiatan Input : 1) Masyarakat dan pencari kerja 2) Peserta pelatihan membuat aneka kue/roti 3) Narasumber dari Kota Payakumbuh 4) Sarana prasarana : Peralatan untuk pelatihan membuat aneka kue/roti dan bahan percontohan. Output : Terlaksananya pelatihan membuat aneka kue/roti bagi masyarakat/pencari kerja Kota Payakumbuh.
Sumber Dana	Rp. 183.210.150,-		
Outcomes	Pelaksanaan pelatihan membuat aneka kue/roti Rumusan Kinerja : 1) Meningkatnya wawasan dan pengetahuan serta keterampilan bagi pencari kerja. Indikator Kinerja : 1) Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan sebanyak 16 orang.		

	2) Tersedianya keterampilan pencari kerja yang siap bersaing di pasar kerja.
--	--

Payakumbuh, 8 Agustus 2022

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Kota Payakumbuh



KHUSDA FATWA, S.Sos. M.Si

NIP. 19670601 198809 2 001



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

Jln. Gelatik Kel. Tigo Koto Diate Kec. Payakumbuh Utara
Telp/Fax. (0752) 7971800 Email : disnakerprin@gmail.com Website : <https://disnakerin.payakumbuhkota.go.id>

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
GENDER BUDGET STATEMENT

OPD : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh
TAHUN ANGGARAN : 2023

Program	Perencanaan dan Pembangunan Industri
Kegiatan	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
Kode kegiatan	3.31.02.2.01.05 (Sesuai RKA-SKPD)
Analisis Situasi	1. Data Pembuka Wawasan a. Tujuan pembangunan ekonomi adalah menciptakan pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi, perubahan social, mengurangi atau menghapus kemiskinan, mengurangi ketimpangan dan pengangguran, sejalan dengan hal tersebut, maka pembangunan ekonomi daerah menghendaki adanya kerjasama diantara pemerintah, sector swasta dan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang dimiliki oleh wilayah tersebut dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja seluas-luasnya. b. Kota Payakumbuh sebagai salah satu kota berkembang di Propinsi Sumatera Barat yang memiliki berbagai potensi terutama di segi industry dan wisata kuliner. Khusus disektor industry, Kota Payakumbuh memiliki berbagai industry makanan ringan, makanan spesifik/rending, industry coklat, perbengkelan alat mesin pertanian, kerajinan yang sudah menembus pasar Nasional.

	c. Perkembangan industri Tahun 2021 mengalami kenaikan dari 1.902 IKM menjadi 1.928 IKM. Untuk perkembangan penyerapan tenaga kerja Tahun 2021 mengalami kenaikan sebanyak 6.308 orang, yang terdiri laki-laki berjumlah 3.178 orang dan perempuan berjumlah 3.130 orang. d. Menyikapi permasalahan tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh melalui bidang perindustrian melakukan kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat dalam bentuk workshop. Tujuan workshop untuk menyajikan produksi oleh IKM pada pengunjung dan mempromosikan produksi dan produk jadi pada pengunjung MPP pada Gallery Kriya. e. Dengan diadakan workshop ini tidak membedakan laki-laki maupun perempuan. 2. Issu dan Faktor Kesenjangan Gender a. Faktor Kesenjangan ➤ Dari aspek akses : Belum terbukanya akses perempuan dan laki-laki IKM dalam mengikuti workshop/pembinaan keterkaitan produksi industri. ➤ Dari aspek partisipasi : Keterlibatan perempuan sangat tinggi peminat dalam mengikuti workshop/pembinaan keterkaitan produksi industri. ➤ Dari aspek control : Tingginya peminat perempuan menyebabkan kontrol mereka terhadap apakah kegiatan itu berjalan dengan baik menjadi sangat terbuka untuk perempuan. ➤ Dari aspek manfaat : Masih kurangnya peminat laki-laki dibandingkan perempuan untuk mengikuti workshop/pembinaan keterkaitan produksi industri.
--	---

b. Penyebab Internal ➤ Masih minimnya pemahaman konsep Gender oleh IKM. ➤ Masih adanya pembatasan antara laki dan perempuan untuk ikut kegiatan workshop/pembinaan kepada IKM. ➤ Lebih terbukanya kapasitas dan kesempatan perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan workshop/pembinaan kepada IKM. ➤ Masih kurangnya peminat laki-laki dibandingkan perempuan untuk mengikuti workshop/pembinaan kepada IKM. c. Penyebab Eksternal ➤ Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang gender bahwa gender adalah mendahulukan perempuan. ➤ Adanya budaya patriarki masih mengutamakan kaum pria dalam hal hal yang seperti menjadi kepala keluarga, kepala desa, ketua kelompok, tokoh masyarakat dll. ➤ Adanya wacana di masyarakat kalau pengrajin laki-laki tidak lazim.			
Rencana Tindak	Kegiatan	Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
		Tujuan	1) Untuk menyajikan produksi oleh IKM pada pengunjung. 2) Mempromosikan produksi dan produk jadi pada pengunjung MPP.
		Aktivitas 1	Pelaksanaan workshop/pembinaan keterkaitan produksi industri bagi IKM 1 Menentukan dan mengundang peserta workshop/pembinaan keterkaitan produksi industri . 2 Menyelenggarakan workshop/pembinaan keterkaitan produksi industri bagi IKM.

			3 Membuat laporan kegiatan. Input : 1) IKM Kota Payakumbuh. 2) IKM peserta workshop/IKM yang mengikuti pembinaan keterkaitan produksi industri hulu ke hilir. 3) Narasumber dari Propinsi dan Kota Payakumbuh. 4) Sarana prasarana : Peralatan untuk workshop dan bahan percontohan. Output : Terlaksananya kegiatan workshop/pembinaan kepada IKM Kota Payakumbuh.
Sumber Dana	Rp. 142.033.256,-		
Outcomes	Pelaksanaan workshop/pembinaan keterkaitan produksi industri bagi IKM Rumusan Kinerja : 1) Meningkatnya dan berkembangnya kemampuan IKM dalam diversifikasi produk sesuai selera pasar dan mempromosikan produk hasil diversifikasi produk yang dihasilkan IKM. Indikator Kinerja : 1) Jumlah peserta mengikuti workshop/pembinaan keterkaitan produksi industri sebanyak 15 IKM. 2) Tersedianya keterampilan IKM yang menerapkan teknologi tepat guna, sehingga produk yang dihasilkan IKM sesuai selera pasar.		

Payakumbuh, 8 Agustus 2022

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Kota Payakumbuh



YUNIDA FATWA, S.Sos. M.Si

NIP. 19670601 198809 2 001

GENDER ANALYSIS PATHWAY DAN POLICY OUTLOOK FOR PLAN OF ACTION (GAP)

DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Kebijakan/Program/Kegiatan/Tujuan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan Dan Rencana Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi Prioritas/Kegiatan/Indikator	Baseline Data	Target Kinerja/Indikator Gender
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1) Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan masalah tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja (Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan), Tenaga kerja dalam pembangunan Nasional merupakan factor dinamika penting yang menentukan laju pertumbuhan perekonomian baik dalam kedudukannya sebagai tenaga kerja produktif maupun sebagai konsumen. Ketidakseimbangan dalam penyebaran penduduk antar daerah atau wilayah mengakibatkan tidak proporsionalnya penggunaan tenaga kerja secara regional dan sektoral sehingga menghambat pula laju pertumbuhan perekonomian Nasional.	Untuk Tahun 2022 diadakan pelatihan menjahit dan pelatihan membuat aneka kue/roti sebanyak 48 orang, yang mayoritas perempuan.	a) Masih minimnya pemahaman konsep Gender oleh peminat (Pencari kerja) b) Masih adanya pembatasan antara laki dan perempuan untuk ikut kegiatan pelatihan c) Adanya kesenjangan tingginya tingkat pengangguran laki-laki d) Masih kurangnya peminat laki-laki dibandingkan perempuan untuk mengikuti pelatihan menjahit.	a) Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang gender bahwa gender adalah mendahulukan perempuan b) Adanya budaya patriarki masih mengutamakan kaum pria dalam hal hal yang seperti menjadi kepala keluarga, kepala desa, ketua kelompok, tokoh masyarakat dll c) Terbatasnya akses dan kapasitas perempuan	Meningkatkan kualitas dan produktifitas SDM pencari kerja sehingga meningkat pula kesejahteraan Tenaga Kerja.	Pelaksanaan pelatihan menjahit dan pelatihan membuat aneka kue/roti 1) Menyeleksi dan menetapkan peserta pelatihan menjahit dan pelatihan membuat aneka kue/roti dari peserta yang mendaftar 2) Menyelenggarakan pelatihan menjahit dan pelatihan membuat aneka kue/roti 3) Membuat laporan kegiatan	Input : 1) Masyarakat dan pencari kerja 2) Peserta pelatihan menjahit dan pelatihan membuat aneka kue/roti 3) Narasumber dari Kota Payakumbuh 4) Sarana prasarana : Peralatan untuk pelatihan menjahit dan pelatihan membuat aneka kue/roti dan bahan percontohan Output : Terlaksananya pelatihan menjahit dan pelatihan membuat aneka kue/roti bagi masyarakat/pencari kerja Kota Payakumbuh.	Rumusan Kinerja : 1) Meningkatnya wawasan dan pengetahuan serta keterampilan bagi pencari kerja Indikator Kinerja : 1) Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan membuat aneka kue/roti sebanyak 16 orang. 2) Tersedianya keterampilan pencari kerja yang siap bersaing di pasar kerja
Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	2) Tujuan pembangunan ekonomi adalah menciptakan pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi, perubahan social, mengurangi atau menghapus kemiskinan, mengurangi ketimpangan dan pengangguran, sejalan dengan hal tersebut, maka pembangunan ekonomi daerah menghendaki adanya kerjasama diantara pemerintah, sector swasta dan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang dimiliki oleh wilayah tersebut dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja seluas-luasnya.	Dengan keterlibatan mayoritas perempuan pada kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi dengan sub kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi, maka menimbulkan beberapa permasalahan kesenjangan sbb:						
Tujuan Meningkatkan Keterampilan Para Pencari Kerja	3) Angka proyeksi Tahun 2021 untuk Kota Payakumbuh, jumlah Angkatan Kerja yang bekerja sebanyak 74.303 orang dan jumlah Pengangguran sebanyak 4.805 orang. Hal ini berarti ada kenaikan Pengangguran dan ada penurunan jumlah Angkatan Kerja yang bekerja. Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Payakumbuh Tahun 2021 mengalami penurunan yang sebelumnya Tahun 2020 sebesar 6,68% dan di Tahun 2021 sebesar 6,47%*. Hal ini bisa terjadi karena pengaruh perekonomian yang tidak stabil terutama di bidang industry maupun UMKM dan ditambah dengan kondisi pandemi covid 19, sehingga secara tidak langsung berimbas pada perekonomian dan kenaikan jumlah pengangguran.	a. Dari aspek akses : Belum terbukanya akses perempuan dan laki-laki dalam melakukan kegiatan pelatihan tersebut. b. Dari aspek partisipasi : Keterlibatan perempuan sangat tinggi peminat dalam melakukan kegiatan pelatihan tersebut. c. Dari aspek control : Tingginya peminat perempuan menyebabkan kontrol mereka terhadap apakah kegiatan itu berjalan dengan baik menjadi sangat terbuka untuk perempuan. d. Dari aspek manfaat : Masih kurangnya peminat laki-laki dibandingkan perempuan untuk mengikuti pelatihan menjahit.						

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Kebijakan/Program/Kegiatan/Tujuan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan Dan Rencana Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi Prioritas/Kegiatan/Indikator	Baseline Data	Target Kinerja/Indikator Gender
	4) Meskipun tingkat pengangguran di Kota Payakumbuh mengalami penurunan dari 6,68% menjadi 6,47%, maka Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh akan tetap menjadi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh. Tingkat pengangguran untuk Tahun 2021 di Kota Payakumbuh berjumlah 4.805 orang. Tingkat pengangguran banyak didominasi oleh laki-laki sebanyak 3.060 orang sedangkan perempuan sebanyak 1.745 orang. 5) Menyikapi permasalahan tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh melakukan kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi dengan sub kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan pencari kerja sehingga mampu bersaing di pasar kerja. 6) Dengan pelatihan ini tidak membedakan laki-laki maupun perempuan. 7) Untuk Tahun 2022 kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja dilaksanakan dengan jumlah peserta 48 orang.							

Payakumbuh, 8 Agustus 2022
 Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
 Kota Payakumbuh



[Signature]
YUNIDA FATWA, S.Sos. M.Si
 NIP. 19670601 198809 2 001

GENDER ANALYSIS PATHWAY DAN POLICY OUTLOOK FOR PLAN OF ACTION (GAP)

DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Kebijakan/Program/Kegiatan/ Tujuan	Data Pembuka Wawancara	Isu Gender			Kebijakan Dan Rencana Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi Prioritas/Kegiatan/Indikator	Baseline Data	Target Kinerja/Indikator Gender
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	1) Tujuan pembangunan ekonomi adalah menciptakan pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi, perubahan social, mengurangi atau menghapus kemiskinan, mengurangi ketimpangan dan pengangguran, sejalan dengan hal tersebut, maka pembangunan ekonomi daerah menghendaki adanya kerjasama diantara pemerintah, sector swasta dan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang dimiliki oleh wilayah tersebut dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja seluas-luasnya.	Untuk Tahun 2022 kegiatan yang dilaksanakan yaitu : Workshop bagi 15 IKM sandang dan kerajinan yang dilaksanakan dengan 1 workshop yaitu : Workshop diversifikasi turunan tenun (Contoh : Membuat tas kombinasi tenun, sandal, souvenir)	a) Masih minimnya pahaman konsep Gender oleh IKM. b) Masih adanya pembatasan antara laki dan perempuan untuk ikut kegiatan workshop/pembinaan kepada IKM. c) Lebih terbukanya kapasitas dan kesempatan perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan workshop/pembinaan kepada IKM. d) Masih kurangnya peminat laki-laki dibandingkan perempuan untuk mengikuti workshop/pembinaan kepada IKM.	a) Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang gender bahwa gender adalah mendahulukan perempuan. b) Adanya budaya patriarki masih mengutamakan kaum pria dalam hal hal yang seperti menjadi kepala keluarga, kepala desa, ketua kelompok, tokoh masyarakat dll. c) Adanya wacana di masyarakat kalau pengrajin laki-laki tidak lazim.	1) Untuk menyajikan produksi oleh IKM pada pengunjung. 2) Mempromosikan produksi dan produk jadi pada pengunjung MPP.	Pelaksanaan workshop/pembinaan keterkaitan produksi industri bagi IKM 1) Menentukan dan mengundang peserta workshop/pembinaan keterkaitan produksi industri . 2) Menyelenggarakan keterkaitan produksi industri bagi IKM. 3) Membuat laporan kegiatan.	Input : 1) IKM Kota Payakumbuh. 2) IKM peserta workshop/IKM yang mengikuti pembinaan keterkaitan produksi industri hulu ke hilir. 3) Narasumber dari Propinsi dan Kota Payakumbuh. 4) Sarana prasarana : Peralatan untuk workshop dan bahan percontohan. Output : Terlaksananya kegiatan workshop/pembinaan kepada IKM Kota Payakumbuh.	Rumusan Kinerja : 1) Meningkatnya dan berkembangnya kemampuan IKM dalam diversifikasi produk sesuai selera pasar dan mempromosikan produk hasil diversifikasi produk yang dihasilkan IKM. Indikator Kinerja : 1) Jumlah peserta mengikuti workshop/pembinaan keterkaitan produksi industri sebanyak 15 IKM. 2) Tersedianya keterampilan IKM yang menerapkan teknologi tepat guna, sehingga produk yang dihasilkan IKM sesuai selera pasar.
Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	2) Kota Payakumbuh sebagai salah satu kota berkembang di Propinsi Sumatera Barat yang memiliki berbagai potensi terutama di segi industry dan wisata kuliner. Khusus disektor industry, Kota Payakumbuh memiliki berbagai industry makanan ringan, makanan spesifik/rending, industry coklat, perbengkelan alat mesin pertanian, kerajinan yang sudah menembus pasar Nasional.	Dengan keterlibatan mayoritas perempuan pada kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat, maka menimbulkan beberapa permasalahan kesenjangan sbb:						

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Kebijakan/Program/Kegiatan/ Tujuan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan Dan Rencana Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi Prioritas/Kegiatan/Indikator	Baseline Data	Target Kinerja/Indikator Gender
Tujuan Untuk Menyajikan Produksi oleh IKM pada pengunjung * Mempromosikan Produksi dan Produk Jadi pada pengunjung MPP pada Gallery Kriya	3) Perkembangan industry Tahun 2021 mengalami kenaikan dari 1.902 IKM menjadi 1.928 IKM. Untuk perkembangan penyerapan tenaga kerja Tahun 2021 mengalami kenaikan sebanyak 6.308 orang, yang terdiri laki-laki berjumlah 3.178 orang dan perempuan berjumlah 3.130 orang. 4) Untuk sector kerajinan khususnya lebih mayoritas perempuan, namun pengrajin laki-laki hanya ada beberapa orang. 5) Menyikapi permasalahan tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh melalui bidang perindustrian melakukan kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat dalam bentuk workshop. Tujuan workshop untuk menyajikan produksi oleh IKM pada pengunjung dan mempromosikan produksi dan produk jadi pada pengunjung MPP pada Gallery Kriya. 6) Dengan diadakan workshop ini tidak membedakan laki-laki maupun perempuan.	a. Dari aspek akses : Belum terbukanya akses perempuan dan laki-laki IKM dalam mengikuti workshop/pembinaan keterkaitan produksi industri. b. Dari aspek partisipasi : Keterlibatan perempuan sangat tinggi peminat dalam mengikuti workshop/pembinaan keterkaitan produksi industri. c. Dari aspek control : Tingginya peminat perempuan menyebabkan kontrol mereka terhadap apakah kegiatan itu berjalan dengan baik menjadi sangat terbuka untuk perempuan. d. Dari aspek manfaat : Masih kurangnya peminat laki-laki dibandingkan perempuan untuk mengikuti workshop/pembinaan keterkaitan produksi industri.						

Payakumbuh, 8 Agustus 2022
 Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
 Kota Payakumbuh



NINDA FATWA, S.Sos. M.Si
 NIP. 19670601 198809 2 001

CASCADING DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2023

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN			
Sasaran 1	:	Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja	
Sasaran 2	:	Meningkatnya Produksi Industri Pengolahan	
Sasaran 3	:	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	
Indikator	:	1.1 Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	93,75%
	:	1.2 Persentase Peningkatan Nilai Produksi	3,00%
	:	1.3 Hasil Penilaian AKIP PD oleh Inspektorat	A
Program	:	1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3,460,738,295
	:	2 Program Perencanaan Tenaga Kerja	59,994,290
	:	3 Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	183,210,150
	:	4 Program Penempatan Tenaga Kerja	114,586,952
	:	5 Program Hubungan Industrial	27,617,800
	:	6 Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1,165,491,785
	:	7 Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	259,229,770
Anggaran	:		5,270,869,042

SEKRETARIS			
Sasaran 1	:	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	
Sasaran 2	:	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	
Indikator	:	1.1 Nilai IKM	90
	:	2.1 Persentase Sasaran, Program dan Kegiatan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Yang Selaras Dengan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	80%
Indikator	:	2.2 Persentase Capaian Realisasi Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	80%
Program	:	1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
Anggaran	:		742,160,523

KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN			
Sasaran 1	:	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perkantoran	
Sasaran 2	:	Meningkatnya Kualitas SDM Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	
Sasaran 3	:	Meningkatnya Kualitas Dokumen Pelayanan Publik Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	
Sasaran 4	:	Meningkatnya Kualitas Layanan Kepegawaian	
Indikator	:	1.1 Persentase Sarana dan Prasarana Kantor Dalam Kondisi Baik	80%
	:	2.1 Persentase Pemenuhan ASN Dalam Perangkat Daerah Sesuai Dengan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	80%
Indikator	:	2.2 Persentase ASN Yang Hadir Tepat Waktu	98%
	:	2.3 Persentase ASN Berpakaian Dinas Dengan Atribut Lengkap	100%
	:	3.1 Persentase Ketersediaan Dokumen Pelayanan Publik	80%
Indikator	:	4.1 Persentase ASN Yang Dokumen Kepegawaiannya Lengkap	100%
	:	4.2 Persentase Pengurusan KGB ASN Tepat Waktu	100%
	:	4.3 Persentase Pengurusan Kenaikan Pangkat ASN Tepat Waktu	100%
Kegiatan	:	1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	96,446,010
Sub Kegiatan	:	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11,469,330
	:	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14,540,680
	:	3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70,436,000
Kegiatan	:	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,718,577,772
Sub Kegiatan	:	4 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,454,327,772
	:	5 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	264,250,000
Kegiatan	:	3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	11,157,720
Sub Kegiatan	:	6 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	11,157,720
	:	4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	251,794,373
Sub Kegiatan	:	7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,004,910
	:	8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12,000,000
	:	9 Penyediaan Logistik Kantor	48,724,140
	:	10 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20,863,310
	:	11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6,004,560
	:	12 Fasilitas Kunjungan Tamu	10,500,000
	:	13 Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	151,697,453
	:	5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	33,000,000
	:	14 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33,000,000
Kegiatan	:	6 Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	239,471,180

KABID TENAGA KERJA			
Sasaran 1	:	Meningkatnya Kesempatan Kerja	
Sasaran 2	:	Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	
Sasaran 3	:	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	
Indikator	:	1.1 Persentase Penempatan Tenaga Kerja Formal	40%
	:	1.2 Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Informal	47%
Indikator	:	2.1 Persentase Pencari Kerja Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	46%
Indikator	:	3.1 Persentase Tenaga Kerja Yang Terlindungi	8,23%
Program	:	1 Program Perencanaan Tenaga Kerja	59,994,290
	:	2 Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	183,210,150
	:	3 Program Pempatan Tenaga Kerja	114,586,952
	:	4 Program Hubungan Industrial	27,617,800
Anggaran	:		385,409,192

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB SUBSTANSI PELATIHAN TENAGA KERJA	
Sasaran 1	: Meningkatkan SDM Pencari Kerja

	15 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,210,000
	16 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	120,000,000
	17 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	117,261,180
Kegiatan	: 7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	110,291,240
	20 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39,190,000
	21 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertinain Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	59,400,000
	22 Pemeliharaan Mebel	5,638,600
	23 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6,062,640
Anggaran	:	3,460,738,295

Sasaran 1	: Terlaksananya kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	
Sasaran 2	: Terlaksananya ASN berpakaian Dinas dengan atribut lengkap	
Sasaran 3	: Terlaksananya ketersediaan dokumen pelayanan publik	
Indikator	: 1.1 Jumlah sarana dan prasarana kantor Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dalam kondisi baik	45 unit
Indikator	: 2.1 Jumlah ASN berpakaian Dinas dengan atribut lengkap	19 ASN
Indikator	: 3.1 Jumlah dokumen pelayanan publik yang dibuat	2 dok

Sasaran 1	: Terlaksananya pemenuhan ASN dalam Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian sesuai dengan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	
Indikator	: 1.1 Jumlah ASN yang sesuai dengan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	19 ASN

KABID PERINDUSTRIAN			
Sasaran 1	:	Meningkatnya Kapasitas Industri Pengolahan	
Sasaran 2	:	Meningkatnya Kualitas Produksi Industri Pengolahan	
Indikator	:	1.1 Persentase Peningkatan Kapasitas Industri Pengolahan	3,69%
Indikator	:	2.1. Persentase Industri Yang Menerapkan Standarisasi Mutu Produk	10,06%
Program	:	1 Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	687,837,610
	:	2 Program Pengendalian Iain Usaha Industri Kabupaten/Kota	259,229,770
Anggaran	:		947,067,380

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB SUBSTANSI INDUSTRI PANGAN		
Sasaran 1	: Meningkatkan Standarisasi Mutu Produk Industri Pengolahan	
Indikator	: 1.1 Jumlah Produk Industri Yang Mendapatkan Sertifikat Industri	73 produk
Kegiatan	: 1 Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	174,972,430

Indikator	:	1.1 Persentase Peningkatan Pencari Kerja Yang Dilatih	0,3%
Kegiatan	:	1 Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	183,210,150
Sub Kegiatan	:	1 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	183,210,150
Anggaran	:		183,210,150

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB SUBSTANSI PENEMPATAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA			
Sasaran 1	:	Meningkatnya Lowongan Pekerjaan Yang Terdaftar	
Sasaran 2	:	Meningkatnya Pelayanan Antar Kerja	
Indikator	:	1.1 Persentase Lowongan Pekerjaan Yang Terdaftar	5%
Indikator	:	2.1 Persentase Pencari Kerja Yang Dilayani	10%
Kegiatan	:	1 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RKT)	59,994,290
Sub Kegiatan	:	1 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	49,954,370
	:	2 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	10,039,920
Kegiatan	:	1 Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	27,448,390
Sub Kegiatan	:	1 Perluasan Kesempatan Kerja	27,448,390
Kegiatan	:	2 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	87,138,562
Sub Kegiatan	:	1 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	87,138,562
Anggaran	:		174,581,242

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB SUBSTANSI HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA			
Sasaran 1	:	Meningkatnya Hubungan Kerja Yang Harmonis Antara Kerja dan Pengusaha	
Sasaran 2	:	Meningkatnya Kepatuhan Perusahaan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	
Indikator	:	1.1 Persentase Penurunan Angka Pemutusan Hubungan Kerja	12,5%
Indikator	:	2.1. Persentase Perusahaan Yang Menjalankan Peraturan Ketenagakerjaan	3,17%
Kegiatan	:	1 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di daerah Kabupaten/Kota	27,617,800
Sub Kegiatan	:	1 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	23,538,400
	:	2 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4,079,400
Anggaran	:		27,617,800

KEPALA UPTD SENTRA IKM BENDANG			
Sasaran 1	:	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Industri Pengolahan	
Sasaran 2	:	Meningkatnya Kualitas Kemasan	
Indikator	:	1.1 Persentase Sarana dan Prasarana Industri Pengolahan Dalam Kondisi Baik	75%
Indikator	:	2.1 Persentase IKM Yang Memiliki Kemasan Yang Berkualitas	75%

Sub Kegiatan	:	1 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	174,972,430
Kegiatan	:	2 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Nasional (SINAS)	259,229,770
Sub Kegiatan	:	1 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan (IUI), IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota, Dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIUNAS) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SINAS)	259,229,770
Anggaran	:		434,202,200

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB SUBSTANSI INDUSTRI SANDANG DAN KERAJINAN			
Sasaran 1	:	Meningkatnya Kapasitas SDM Industri Pengolahan	
Sasaran 2	:	Meningkatnya Kemitraan Industri Pengolahan	
Indikator	:	1.1 Persentase SDM Industri Pengolahan Yang Kompeten	
Indikator	:	2.1 Persentase Pelaku Industri Pengolahan Yang Melakukan Kerjasama	
Anggaran	:		

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB SUBSTANSI INDUSTRI LOGAM, ELEKTRONIKA, KIMIA DAN BAHAN BANGUNAN			
Sasaran 1	:	Meningkatnya Kapasitas SDM Industri Pengolahan	
Sasaran 2	:	Meningkatnya Penerapan Teknologi Industri Pengolahan	
Sasaran 3	:	Meningkatnya Kemitraan Industri Pengolahan	
Indikator	:	1.1 Persentase SDM Industri Pengolahan Yang Kompeten	0,52%
Indikator	:	2.1 Persentase Industri Pengolahan Yang Menerapkan Teknologi	0,52%
	:	3.1 Persentase Pelaku Industri Pengolahan Yang Melakukan Kerjasama	0,16%
Kegiatan	:	1 Penyusunan, Penerapan	512,865,180
Sub Kegiatan	:	1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	339,723,509
	:	2 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	31,108,415
	:	3 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	142,033,256
Anggaran	:		512,865,180

Kegiatan	:	1	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	477,654,175
Sub Kegiatan	:	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	477,654,175
Anggaran	:			477,654,175



KEPALA TATA USAHA UPTD SENTRA IKM RENDANG				
Sasaran 1	:	Meningkatnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Industri Pengolahan		
Sasaran 2	:	Meningkatnya Kualitas Bahan Kemasan		
Sasaran 3	:	Meningkatnya Kualitas Desain Kemasan		
Indikator	:	1.1	Persentase Sarana dan Prasarana Industri Pengolahan Yang Dipelihara	75%
Indikator	:	2.1	Persentase Industri Pengolahan Yang Menggunakan Kemasan Standar	75%
Indikator	:	3.1	Persentase Industri Pengolahan Yang Menggunakan Kemasan Yang Baik	75%
Anggaran	:			-

KASUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN			
Sasaran 1	:	Meningkatnya Realisasi Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	
Sasaran 2	:	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Program Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	
Indikator	:	1.1 Persentase Realisasi Keuangan Terhadap Aliran Kas	80,00%
Indikator	:	2.1 Persentase Capaian Kinerja Program Kegiatan	80,00%
Kegiatan	:	1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	:	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	:	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
	:	3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
Anggaran	:		0



Sasaran 1	:	Terlaksananya verifikasi terhadap dokumen usulan pencatran anggaran	
Indikator	:	1.1 Jumlah data dokumen pertanggungjawaban (SPJ) yang diterima dari PPTK	12 dok
	:	1.2 Jumlah bahan usulan pencatran anggaran yang diversifikasi	12 dok
	:	1.3 Jumlah pengelompokan dokumen pertanggungjawaban	12 dok



Sasaran 1	:	Terlaksananya Pengajuan SPP Keuangan	
Sasaran 2	:	Terlaksananya Proses Pengelolaan Keuangan Oleh Bendahara Pengeluaran	
Indikator	:	1.1 Jumlah Dokumen Permintaan Pembayaran Menggunakan SPP UP /GU/TU dan SPP-LS Yang Diajukan	12 dok
Indikator	:	2.1 Jumlah rekening tempat penyimpanan UP yang dikelola	12 dok
	:	2.2 Jumlah pembayaran berdasarkan bukti pembayaran /SPJ yang diajukan BPP	900 kwitansi
	:	2.3 Jumlah seluruh tanda bukti pengeluaran/SPJ	900 kwitansi
	:	2.4 Jumlah seluruh SP2D yang diterima dan dibukukan	82 dok
	:	2.5 Jumlah laporan pertanggungjawaban fungsional bulanan yang dibuat	12 dok

:	2.6	Jumlah dokumen pemotongan pajak berdasarkan pembayaran/SPJ yang dilakukan	50 dok
:	2.7	Jumlah dokumen penyetoran pajak yang diterima ke kas Negara	50 dok
:	2.8	Jumlah buku bantu register pajak yang dibuat	12 dok
:	2.9	Jumlah laporan pajak bulanan yang dibuat	12 dok
:	2.10	Jumlah rekonsiliasi penerimaan SP2D yang di terima	82 dok
:	2.11	Jumlah pengajuan SPP kepada Penggunaan Anggaran berdasarkan DPA	30 dok
:	2.12	Jumlah laporan penutupan kas yang dibuat	12 dok
:	2.13	Jumlah dokumen laporan pertanggungjawaban administrasi bulanan kepada atasan	12 dok



Sasaran 2	Tersedianya Laporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		
Indikator	:	1.1 Jumlah laporan realisasi anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	24 berkas
	:	1.2 Jumlah bahan, jurnal dan mencetak laporan operasional Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	4 dok
	:	1.3 Jumlah bahan, jurnal dan mencetak laporan neraca Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	2 berkas
	:	1.4 Jumlah bahan, jurnal dan mencetak laporan perubahan ekuitas Dinas Tenaga Kerja dan Perindustri	2 berkas
	:	1.5 Jumlah mencetak catatan atas laporan keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	2 berkas

